

**IMPLEMENTASI JURNALISME DAMAI PADA SKH REPUBLIKA DAN
SKH KOMPAS (STUDI PEMBERITAAN KASUS DUGAAN PENISTAAN
AGAMA OLEH AHOK EDISI OKTOBER-NOVEMBER 2016)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

IDA FADILAH

NIM 13210101

Pembimbing:

Saptoni, S.Ag., M.A.

NIP 19730221 199903 1 002

**PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-720/Un.02/DD/PP.00.9/09/2017

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI JURNALISME DAMAI PADA SKH REPUBLIKA DAN SKH KOMPAS
(STUDI PEMBERITAAN KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA OLEH AHOK EDISI OKTOBER - NOVEMBER 2016)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IDA FADILAH
Nomor Induk Mahasiswa : 13210101
Telah diujikan pada : Selasa, 19 September 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Saptoni, S.Ag., M.A
NIP. 19730221 199903 1 002

Penguji I

Dr. H. M. Kholili, M.Si.
NIP. 19590408 198503 1 005

Penguji II

Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos., M.Si
NIP. 19840307 201101 1 013

Yogyakarta, 19 September 2017
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Dakwah dan Komunikasi
DEKAN



Dr. Nurrahmah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ida Fadilah

NIM : 13210101

Judul Skripsi : Implementasi Jurnalisme Damai Pada SKH Republika dan SKH Kompas (Studi Pemberitaan Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok edisi Oktober - November 2016)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 31 Juli 2017


Mengetahui,

Ketua Prodi
Komunikasi dan Penyiaran Islam

Drs. Abdul Rozak, M.Pd.
NIP. 19671006 199403 1 003



Pembimbing


Saptoni, S.Ag., M.A.
NIP. 19730221 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ida Fadilah

NIM : 13210101

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: “Implementasi Jurnalisme Damai Pada SKH Republika dan SKH Kompas (Studi Pemberitaan Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok edisi Oktober-November 2016)” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Juli 2017

Yang menyatakan,



Ida Fadilah

NIM. 13210101

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa berdasarkan QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 54, maka saya:

Nama : Ida Fadilah

NIM : 13210101

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Alamat asal : JL. Panda VIII/ C-9/46 Cikarang Baru RT/RW 001/007 Desa Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Menyatakan dan mengajukan permohonan untuk tidak melepaskan jilbab pada foto Ijazah Sarjana. Apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka saya bersedia bertanggung jawab atas semua akibatnya.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Ibu saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 31 Juli 2017

Yang membuat pernyataan,



Ida Fadilah

NIM. 13210101

Skripsi ini aku dipersembahkan untuk:

Kepada keluargaku sangat tercinta Abah dan Ibu, dalam do'a dan restumu alhamdulillah dapat menyelesaikan perjuangan ini. Abah dan Ibu yang selalu menasihati, memberiku energi yang positif, dan tak lupa do'amu yang selalu hadir dalam setiap kemudahan serta kelancaran hidupku.

Kakak kandungku yang paling kusayangi: Mba Ulfa, Mba Iis, Mas Andi. Adik bontotmu ini sudah berusaha mencapai sebuah kesuksesan, tanpa bantuan kalian aku tidak bisa apa-apa. Terima kasih juga sudah dengan sabar selalu memberiku semangat disaat diriku mulai jengah.

Keponakanku tercinta: Mas Zaky, Naila, Fasya, dan Rasya yang telah menjadi pemanis dalam hidupku.

Semua teman, sahabat, kalian sangat membantu dan memberi motivasi, mengajarkan aku bagaimana hidup yang sebenarnya dan selalu sabar

MOTTO

Maka tidak lama kemudian (datanglah Hud-Hud) lalu ia berkata, “Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba’ membawa suatu berita yang meyakinkan.

(An-Naml: 22)

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. (Ali Imran: 103)

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Al-Hujurat: 9)

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, dan kenikmatan yang tak terhingga sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul” Implementasi Jurnalisme Damai Pada SKH Republika dan SKH Kompas (Studi Pemberitaan Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok edisi Oktober-November 2016) serta telah menyelesaikan Strata I Progam Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar, Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan pembawa risalah untuk semua umat sampai saat ini. Semoga kita semua termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW yang taat.

Perlu di ketahui bahwa penyusunan skripsi merupakan sebagai syarat mendapatkan Strata I Progam Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan ataupun isi dari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharapkan adanya saran dan kritik dari pihak akademisi, peneliti selanjutnya, dan semua pihak untuk perbaikan skripsi ini.

Peneliti sampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang telah ikut membantu dalam proses penyusunan penelitian ini hingga telah selesai menjadi sebuah skripsi. Ucapan terima kasih peneliti juga sampaikan kepada:

1. Prof Drs KH Yudian Wahyudi PhD selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Nurjannah, M.Si, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
3. Drs. Abdul Rozak, M.Pd, selaku ketua Progam Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
5. Saptoni, S.Ag., M.A., selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih telah memberikan masukan dan kritikan serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. H M. Kholili, M.Si dan Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos., M.Si selaku penguji skripsi. Terima kasih telah membantu memberi masukan agar penyusunan skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Ibu dan Abah. Terima kasih atas kasih sayang, dorongan semangat dan membantu hidupku selama di Jogja. Tanpa restu dan do'a kalian, aku belum tentu dapat kuliah disini.
8. Kakak-kakakku, Mba Ulfa, Mba Iis, Mas Andi, serta Kakak Iparku. Kalian saudara kandungku yang sangat solid dan membantu adik bontotmu ini selama di Jogja, aku sayang kalian.
9. Keponakanku, Mas Zaky, Naila, Fasya, dan Rasya. Keponakan yang aku sayangi.

10. Teman-temanku KPI 2013, terutama KPI B yang selalu menjadi teman sekaligus sahabat terdekat: Manda, Nia, dan semuanya yang tidak dapat peneliti tulis satu persatu.
11. Kawan Arena, teman diskusi walau hanya 1,5 tahun bersama membuatku belajar menjadi seorang wartawan dan mengenal jurnalistik.
12. Teman-teman PSM Gita Savana, terutama kawan alto: Menur, Dinar, Faela, Epi, Farrah, dan lainnya yang telah menjadi partner nyanyiku dan sudah mau sabar menghadapiku.
13. Teman KKN, Gita, Ulis, Yahya, Mulya, Mas Ilyas, Andra, Ahsan, dan Mas Adil yang sudah jadi menjadi kawan yang suka senang bareng selama KKN di desa Banaran.
14. Sedulur Tegal, Oji, Dian, Dije, Dullah, Ismi, dan lainnya yang telah bersama-sama belajar hidup di Jogja.
15. Masku, terima kasih sudah mendengarkan keluh kesahku, menghadapi keadaanku, dan membantu memberiku semangat.
16. Anak kos Ijo Sapen (GK 1 643), konco koplak: Mba Hari, Tantri, Dije, Hawa, Nanda, dan Sismi yang sudah hidup secepat selama 4 tahun lebih, kalian benar-benar sahabat paling terbaik yang pernah aku punya.
17. Semua pihak yang telah membantu sehingga tersusun skripsi ini yang tidak dapat disebut satu-persatu.

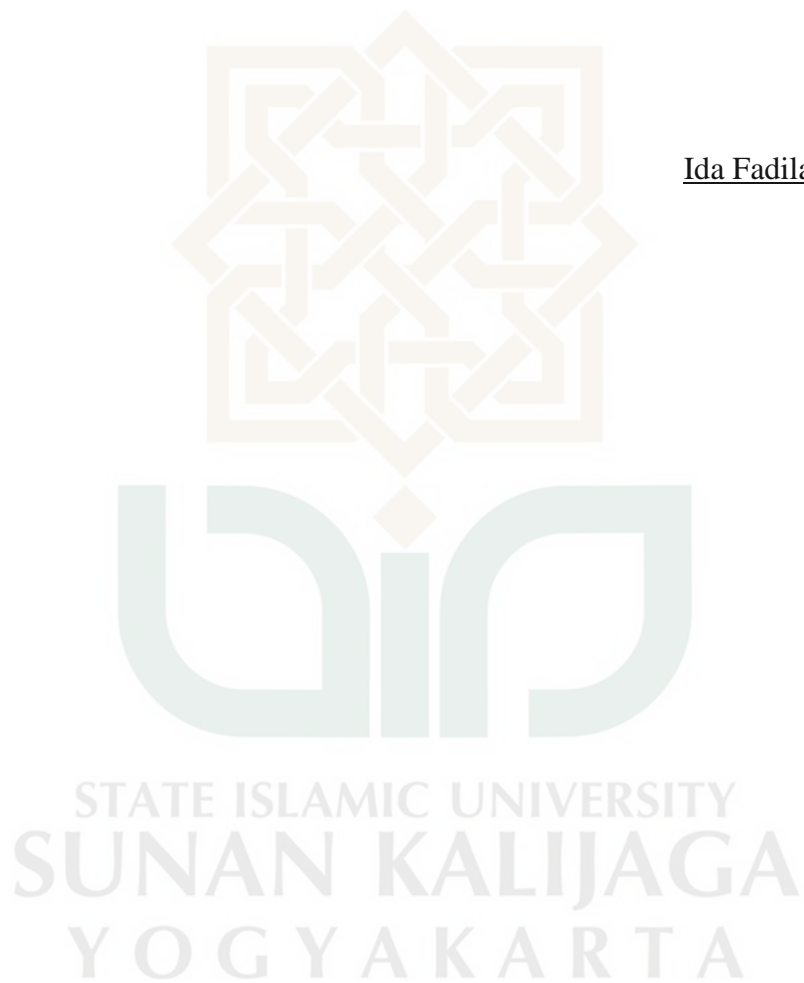
Akhirnya peneliti berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang

Komunikasi dan Penyiaran Islam serta menjadi pengalaman yang berharga bagi peneliti.

Yogyakarta, 11 Agustus 2017

Penyusun

Ida Fadilah



ABSTRAK

IDA FADILAH 13210101. Implementasi Jurnalisme Damai Pada SKH Republika dan SKH Kompas (Studi Pemberitaan Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok edisi Oktober-November 2016). Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Dalam media massa, pemberitaan konflik terutama yang berbau SARA menjadi isu yang hangat bagi para wartawan ataupun reporter untuk meliputnya. Meskipun pemberitaan mengenai SARA dilarang, namun pers maupun media berkewajiban untuk menyeleksi setiap kejadian dan konflik. Framing atau pembingkai berita menjadi salah satu cara bagaimana wartawan membingkai dan mengemas peristiwa menjadi berita yang layak dipublikasikan. Terkait pemberitaan SARA, tidak menutup kemungkinan media memiliki keberpihakan. Dalam menyikapi fenomena keberpihakan, peneliti ingin melihat apakah media menjadi peredam konflik dalam pemberitaan atau menjadi pelopor perdamaian.

Penelitian ini mengenai kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menimbulkan sensitifitas di kalangan masyarakat. Kasus penistaan agama yang terjadi pada saat kunjungan Ahok di Kepulauan Seribu, dalam pernyataan Ahok sebagai berikut: “Bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu *nggak* bisa pilih saya. *Ya kan* dibohongi pakai surat Al-Maidah :51 *macem-macem* itu”. Dalam penelitian ini, SKH Republika dan SKH Kompas menjadi media yang memberitakan kasus penistaan agama dan memiliki pandangan berbeda dalam setiap pemberitaannya. SKH Republika dan SKH Kompas, nantinya akan diteliti menggunakan analisis Robert N. Entman dan menginterpretasikan ke dalam jurnalisme damai. Dari hasil analisis jurnalisme damai, akan dilihat media Republika memiliki pandangan dalam masalah Ahok sebagai masalah hukum dan Kompas mendefinisikan masalah Ahok sebagai masalah SARA dan kepentingan pilkada.

Kata Kunci: Media, Pemberitaan Konflik dan SARA, Kasus Dugaan Penistaan Agama, dan Jurnalisme Damai.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan	20

BAB II: PENISTAAN AGAMA DAN MEDIA CETAK

A. Menelisik Tentang Penistaan atau Penodaan Agama	21
1. Definisi Penistaan Agama	21
2. Kriteria Penistaan Agama.....	23
3. Hukuman Bagi Pelaku Penistaan atau Penodaan Agama	25
B. Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok	26
C. Profil Surat Kabar Harian (SKH) Republika.....	29

1. Sejarah SKH Republika.....	29
2. Visi dan Misi SKH Republika.....	30
3. Perkembangan Republika.....	34
D. Profil Surat Kabar Harian (SKH) Kompas.....	35
1. Sejarah SKH Kompas.....	35
2. Visi dan Misi SKH Kompas.....	37
3. Perkembangan Kompas.....	39

BAB III: FRAMING PEMBERITAAN DAN JURNALISME DAMAI

A. Framing Berita SKH Republika.....	41
1. Berita 1.....	41
2. Berita 2.....	46
3. Berita 3.....	50
4. Berita 4.....	55
5. Kesimpulan Framing SKH Republika.....	60
B. Framing Berita SKH Kompas.....	60
1. Berita 5.....	60
2. Berita 6.....	64
3. Berita 7.....	69
4. Berita 8.....	75
5. Kesimpulan Framing SKH Kompas.....	81
C. Implementasi Jurnalisme Damai	
SKH Republika dan SKH Kompas.....	82
1. SKH Republika.....	83
a. Orientasi Perdamaian.....	83
b. Orientasi Golongan Masyarakat.....	84
c. Orientasi Kebenaran.....	86
d. Orientasi Penyelesaian.....	87
2. SKH Kompas.....	88
a. Orientasi Perdamaian.....	88
b. Orientasi Golongan Masyarakat.....	90
c. Orientasi Kebenaran.....	92
d. Orientasi Penyelesaian.....	94

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Analisi Data Implementasi Jurnalisme Damai
2. Berita SKH Republika
3. Berita SKH Kompas
4. Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Model Segitiga proses terjadinya konflik	13
Tabel 2	Liputan Jurnalisme Damai dan Jurnalisme Perang	15
Tabel 3	Analisis Robert N. Entman.....	18
Tabel 4	Analisis Data	19
Tabel 5	Berita 1	43
Tabel 6	Berita 2	48
Tabel 7	Berita 3	52
Tabel 8	Berita 4	57
Tabel 9	Kesimpulan Framing SKH Republika.....	60
Tabel 10	Berita 5	62
Tabel 11	Berita 6	66
Tabel 12	Berita 7	71
Tabel 13	Berita 8	77
Tabel 14	Kesimpulan Framing SKH Kompas.....	81
Tabel 15	Jurnalisme damai SKH Republika dan SKH Kompas	82

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bersosial, manusia hidup berdampingan dengan manusia lainnya dengan berbagai keberagaman seperti suku, agama dan ras (SARA). Keberagaman tersebut menjadi suatu keindahan tersendiri dalam hidup bernegara. Perbedaan keberagaman ini perlu diimbangi rasa toleransi terutama terhadap sesama umat beragama.

Tingkat toleransi terhadap umat beragama di Indonesia menurun, tercatat dalam kurun waktu 1990 sampai dengan 2000 banyak terjadi konflik sosial, dan kerusuhan sosial yang bernuansa SARA. Dalam konflik sosial tersebut melibatkan simbol-simbol dan sentimen-sentimen agama.¹ Data *Center of Strategic and International Studies* (CSIS) menunjukkan bahwa tingkat toleransi di Indonesia tergolong rendah pada tahun 2012. Dalam data CSIS disebutkan, masyarakat menerima hidup keberagaman akan tetapi masih ragu-ragu untuk menoleransi keberagaman. Sebanyak 59,5 persen setuju dan tidak keberatan bertetangga dengan masyarakat beragama lain. Namun, saat ditanya soal pembangunan rumah ibadah agama lain di lingkungannya, sebanyak 68,2 persen menyatakan lebih baik

¹Imam Tholikhah, dkk. (ed.), *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Kehidupan Beragama, 2002), hlm. 22.

hal itu tidak dilakukan. Dan hanya 22,1 persen yang tidak berkeberatan dengan pembangunan rumah ibadah agama lain.²

Menyikapi data yang diperoleh dari CSIS tersebut, dikhawatirkan tingkat toleransi di Indonesia semakin rendah dan dapat menimbulkan konflik sosial baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Jika konflik sosial ini tidak segera ditangani, dapat memecah belah sendi-sendi persatuan kebangsaan kita. Perdamaian harus segera diwujudkan oleh masyarakat Indonesia ketika dihadapkan pada sebuah konflik.

Pada bulan September tahun 2016 yang lalu, masyarakat maupun media digemparkan oleh pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh calon petahana Gubernur DKI Jakarta. Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok tersebut berawal ketika pernyataannya saat menyampaikan arahan kepada masyarakat Kepulauan Seribu. Adapun pernyataan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dilansir dari Surat Kabar Harian (SKH) Republika mengenai dugaan penistaan agama pada saat kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu tersebut: “Bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu *nggak* bisa pilih saya, *Ya kan* dibohongi pakai surat Al-Maidah :51 *macam-macam* itu”.³

Adapun data dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan bahwa bahwa pada bulan November sebesar 62% respon masyarakat menyatakan pernyataan Ahok termasuk dalam dugaan penistaan agama. Untuk beberapa masyarakat yang lain berpendapat, bahwa sebesar 18% respon masyarakat

²Arief Priyono, “Survei: Toleransi Beragama Orang Indonesia Rendah”, *Tempo.co*, <https://m.tempo.co/read/news/2012/06/05/173408521/survei-toleransi-beragama-orang-indonesia-rendah>, diakses tanggal 23 Februari 2017.

³Fauziah Mursyid, “Barekrim Proses Laporan Terkait Ahok”, *Republika*, (Oktober, 2016), hlm. 3.

menyatakan Ahok tidak menistakan agama sedangkan pada bulan Desember, cenderung naik 26 % respon masyarakat mengenai kasus dugaan penistaan agama. Dan sisanya masyarakat tidak tahu terkait kasus dugaan penistaan agama.

⁴ Pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu tersebut, menimbulkan berbagai reaksi terutama masyarakat muslim yang menjadi masyarakat mayoritas di Indonesia. Ahok melihat pro kontra pemberitaan terkait pernyataannya di Kepulauan Seribu tersebut mencoba mengklarifikasi dan meluruskan maksud dari pernyataannya terkait surat Al-Maidah ayat 51.

Terkait pernyataannya pada surat Al-Maidah ayat 51, Ahok pun menyadari kekeliruan dalam pengucapan dan menyebabkan reaksi masyarakat yang berbeda. Di satu sisi, Ahok pun sudah meminta maaf dan tidak ada maksud untuk menyinggung umat muslim. Akan tetapi, beberapa masyarakat melaporkan pernyataan Ahok kepada Bareskrim. Terdapat empat orang yang melaporkan pernyataan Ahok sebagai kasus dugaan penistaan agama di sejumlah tempat: Polda Metro Jaya, Sulawesi Selatan, dan di Bareskrim mendapatkan dua pelapor.⁵

Ahok yang notabenenya adalah Gubernur DKI Jakarta juga memiliki rekam jejak dugaan keterkaitannya dalam kasus-kasus seperti: reklamasi, penggusuran, hingga kasus dugaan penistaan agama yang menimbulkan reaksi masyarakat yang beragam. Salah satu adanya aksi damai pada 4 November 2016 merupakan respon masyarakat terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Dalam aksi 4 November tersebut, terdapat beberapa konflik yang dilakukan oleh

⁴“Likeability Is Electability? Kualitas Personal Calon Dalam Pilkada DKI Pasca-Insiden-Al-Maidah”, *Lembaga Survei Indonesia*, (Desember,2016). hlm. 59.

⁵Mabruroh dan Noer Qomariah Kusumawardhani, "Kasus Ahok tetap Diproses", *Republika*, (Oktober, 2016), hlm. 3.

beberapa peserta unjuk rasa yang menimbulkan kericuhan dan konflik antara aparat keamanan dan sebagian peserta unjuk rasa.⁶

Republika dan Kompas merupakan dua media yang turut serta menyorot perkembangan kasus dugaan penistaan agama tersebut. SKH Republika dan SKH Kompas adalah media cetak nasional terbaik yang diberikan oleh Pusat Pembinaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.⁷ Dalam perjalanannya, Republika terus berkembang dan semakin profesional, matang dan menjadi koran Nasional. Pada tahun 2006, koran Republika mendapatkan penghargaan sebagai Koran Terbaik oleh Dewan Pers. Sedangkan Kompas selain menjadi koran nasional juga menjadi koran terbaik dalam pemberitaannya. Dalam penjualan dan sirkulasinya menjadi terbesar di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara.⁸

Melihat kembali kasus Ahok dalam suatu pemberitaan, maka harus ada sebuah jalan perdamaian. Media massa yang merupakan akses informasi utama harusnya mampu menerapkan jurnalisme damai dalam pemberitaannya. Jurnalisme damai bukan berarti media sebagai mediasi dalam sebuah konflik, akan tetapi jurnalisme berita yang disajikan wartawan merupakan produk dari kejournalistikaannya di lapangan.

Menyikapi pemberitaan tentang Ahok tersebut, sehingga jurnalisme damai sangat penting untuk diterapkan pada pemberitaan media massa ketika harus

⁶Setyawan, "Presiden: Aktor Politik Menunggangi", *Kompas*, (November, 2016), hlm. 1.

⁷Syifaul Arifin, "Solopos Koran Berbahasa Indonesia Terbaik ke-9", *Solopos*, <http://m.solopos.com/2015/12/31/media-berprestasi-solopos-koran-berbahasa-indonesia-terbaik-ke-9-676121>, diakses tanggal 10 Juni 2017.

⁸"Kompas (surat kabar)", *wikipedia.org*, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kompas_\(surat_kabar\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kompas_(surat_kabar)), diakses tanggal 10 Juni 2017.

mengabarkan peristiwa SARA ataupun yang menimbulkan konflik. Media dalam pemberitaannya harus mampu menempatkan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan menerapkan jurnalisme damai. Sampai saat ini khalayak menginginkan media yang berwujud resolusi bukan lagi provokatif. Untuk itu, peneliti menjadi tertarik untuk mengetahui bagaimana media Republika dan Kompas mengimplementasikan jurnalisme damai dalam pemberitaan kasus dugaan penistaan agama.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi jurnalisme damai pada SKH Republika dan SKH Kompas (studi pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok edisi Oktober-November 2016)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah menemukan jawaban terhadap pertanyaan dalam rumusan masalah. Dalam hal ini untuk mengetahui implementasi jurnalisme damai pada SKH Republika dan SKH Kompas (studi pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok edisi Oktober-November 2016).

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi dan manfaat bagi khalayak. Adapun manfaat tersebut, peneliti membagi 2 manfaat yaitu :

1. Teoritis

- a. Dapat dijadikan pengetahuan dan referensi keilmuan komunikasi khususnya dalam implementasi jurnalisme damai;
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya;
- c. Dapat mengetahui penyelesaian pemberitaan melalui implementasi jurnalisme damai.

2. Praktis

- a. Bagi pembaca, diharapkan mampu menyikapi dan mencermati kembali persoalan pemberitaan yang menyangkut isu SARA termasuk sentimen keagamaan;
- b. Bagi praktisi media, mampu menempatkan pemberitaan dalam media sekaligus sebagai masukan untuk lebih memahami pemberitaan yang netral dan menerapkan jurnalisme damai.

E. Kajian Pustaka

Dalam hal ini peneliti melakukan tinjauan pustaka untuk menghindari adanya plagiat dan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Disini peneliti mengambil rujukan dari beberapa skripsi antara lain:

Skripsi yang cukup relevan dengan referensi peneliti yaitu: dari Serafica Gischa Prameswari dengan judul “Jurnalisme damai dalam pemberitaan surat kabar harian Solopos mengenai konflik Keraton Kasunanan Surakarta periode Mei 2012-April 2013” dari studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta.⁹ Dijelaskan mengenai peristiwa konflik Keraton Kasunan Surakarta yang diberitakan oleh Solopos. Peristiwa konflik ini bermula saat pada bulan Mei tahun 2012, Tedjowulan rela melepas gelar rajanya dan akan mendukung kakaknya (Paku Buwono XIII Hangabehi) memimpin kerajaan dan menjadi wakil raja. Akan tetapi, Dewan Adat Keraton tidak menerima rekonsiliasi dan terjadilah konflik. Dalam skripsi Serafica ini, menggunakan metodologi kuantitatif untuk menganalisis jurnalisme damai dengan menganalisis data kuantitatif pemberitaan dari solopos sebanyak 85 berita.

Skripsi dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi yaitu Indah Fajar Rosalina dengan judul “Jurnalisme Damai Media Online dalam Kasus Lurah Susan”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan penerapan jurnalisme damai dalam dua media online yaitu media Kompas.com dan Tempo.com. Disebutkan bahwa kedua media tersebut memiliki latar belakang yang berbeda dan memilih media online sebagai media alternatif masa kini dan mudah diakses.¹⁰ Media online menjadi salah satu jawaban atas pemberitaan langsung yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.

Menggunakan kasus Lurah Susan yang mendapat penolakan saat dirinya menjadi lurah yang beragama kristen dan menimbulkan konflik di berbagai pihak. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan analisis data framing Robert N Entman dan dapat disimpulkan dari penelitian Indah ini bahwa penerapan

⁹Serafica Gischa Prameswari, *Jurnalisme Damai dalam Pemberitaan Surat Kabar Harian Solopos Mengenai Konflik Keraton Kasunanan Surakarta periode Mei 2012-April 2013*, Skripsi (Yogyakarta: Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014), hlm. 1.

¹⁰Indah Fajar Rosalina, *Jurnalisme Damai Media Online Dalam Kasus Lurah Susan*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 1.

jurnalisme damai media online Kompas belum sepenuhnya menerapkan jurnalisme damai dibandingkan dengan Tempo. Hal tersebut dilihat dari segi orientasi perdamaian, orientasi pada kebenaran dan masyarakat, dan orientasi penyelesaian.

Adapun masih menggunakan jurnalisme damai yaitu, skripsi dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi Eko Sulistyono dengan judul “Jurnalisme Damai Dalam Narasi Pemberitaan Majalah Tempo Edisi Khusus Pengakuan Algojo 65 (1-7 Oktober 2012). Dalam skripsi tersebut dijelaskan menggunakan analisis isi naratif dan memilih majalah Tempo sebagai acuan media untuk dianalisis. Dalam kasus ini, pemberitaan yang mengusut kembali kasus pengakuan Algojo pada tahun 1965. Pada tahun 1965 terjadi pembunuhan massal anggota PKI. Pemberitaan yang memanaskan dan sekaligus menjadi catatan merah bagi Indonesia. Pembunuhan massal ini membawa luka lama yang kembali di ungkap melalui majalah Tempo. Penelitian ini sama-sama menggunakan Jurnalisme Damai, akan tetapi dalam skripsi ini menggunakan analisis naratif.¹¹ Dalam analisis isi naratif bersifat deskriptif yang terdiri dari analisis alur, analisis struktur analisis, analisis karakter dalam narasi posisi narator dan oposisi biner dalam pemberitaan.

Perbedaan penelitian dengan skripsi milik Eko Sulistyono adanya analisis yang digunakan, peneliti menggunakan analisis Robert N. Entman dihubungkan dengan penerapan jurnalisme damai. Lalu perbedaan dengan skripsi milik Indah adalah, peneliti menggunakan media cetak sebagai subjek penelitian dan hasil

¹¹Eko Sulistyono, *Jurnalisme Damai Dalam Narasi Pemberitaan Majalah Tempo Edisi Khusus Pengakuan Algojo 65 (1-7 Oktober 2012)*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 19.

analisis yang berbeda pula. Dapat diketahui bahwa dalam melakukan analisis, berita yang akan diteliti harus utuh dan tidak terpotong-potong yang dapat menimbulkan minim informasi. Untuk itu, perlu adanya isi pemberitaan yang detail dan mendalam demi mendukung jalannya proses analisis.¹² Melalui media cetak, penulis berharap dapat melakukan analisis berita secara detail.

F. Kerangka Teori

1. Pemberitaan Konflik Di Media Massa

Media massa wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat yang jujur dan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, tidaklah mudah menyajikan sebuah pemberitaan karena masih banyak beberapa media yang menyimpang dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Jika media tidak mampu mengendalikan pemberitaannya maka akan dapat memuat informasi yang menimbulkan pertikaian.

Pers pada saat ini menerima segala pemberitaan di berbagai penjuru, hal ini perlu dicermati terkait pemberitaan SARA yang dapat menimbulkan konflik. Pemberitaan konflik menjadi sajian bagi pelaku media ketika dihadapkan berbagai konflik terutama konflik SARA. Pemberitaan konflik yang berbau SARA sangat sensitif. Untuk itu, media maupun wartawan harus lebih seleksi dalam penertibannya.

¹²Abdul Rozak, "Analisis Teks Media", bahan ajar yang disampaikan pada perkuliahan Komunikasi dan Penyiaran Islam (Yogyakarta: Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga, Desember 2015).

Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan wartawan dalam menghindari pemberitaan konflik dan SARA:¹³

- a. Pada saat melakukan peliputan peristiwa lakukan cek dan ricek terlebih dahulu untuk kebenaran informasi yang anda turunkan;
- b. Untuk memperjelas informasi, bisa dilakukan dengan cara investigasi;
- c. Pilih kata-kata yang pantas untuk anda kutip dari ucapan narasumber;
- d. Rangkai kata-kata yang berkesinambungan antara satu sumber dengan sumber lainnya agar membentuk satu kesatuan pemahaman;
- e. Hindari kutipan ucapan yang membingungkan pembaca atau menimbulkan konflik;
- f. Hindari mengungkapkan pendapat anda yang bisa membuat pengungkapan fakta peristiwa menjadi bias atau rancu;
- g. Jangan mencampuradukkan antara fakta dan opini;
- h. Fokuskan angle arah penulisan.

Menjadi seorang jurnalis tidaklah mudah, tugas utama seorang jurnalis bukan untuk mengurangi konflik semata, akan tetapi menyajikan dan menerapkan jurnalisme yang baik. Jurnalis atau wartawan mempunyai dua mata sisi yang berbeda, bisa menjadi pemicu konflik dalam pemberitaannya dan bisa juga menciptakan perdamaian dalam pemberitaannya. Menurut Howard, jurnalisme yang baik (*good journalism*) mempunyai tiga komponen, yaitu:¹⁴

¹³Eni Setiati, *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*, ed. 1 (Yogyakarta: C V ANDI OFFSET, 2005), hlm. 70.

¹⁴Ivan Muhammad Agung, "Peran Media dalam Merekonstruksi Konflik dan Perdamaian : Suatu Tinjauan Psikologi Sosial", *UIN Suska Riau* (April, 2011), hlm. 5.

a) Akurasi

Memperoleh Informasi yang akurat merupakan unsur penting dalam jurnalisme yang baik. Nama, tempat kejadian dan pesan yang disampaikan harus berdasarkan data dan bukti yang diakui kebenarannya;

b) Seimbang

Dalam menyajikan informasi harus seimbang tidak mengambil satu perspektif, tapi memberikan beberapa perspektif yang berbeda. Ini berguna untuk pemahaman audiens dalam memahami sesuatu fenomena secara utuh;

c) Bertanggung jawab

Jurnalis harus bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan kepada masyarakat. Jurnalis juga bertanggung jawab untuk melindungi atau merahasiakan narasumbernya.

Akan tetapi dalam kenyataannya terutama dalam dunia jurnalistik, pemberitaan konflik atau pemberitaan perselisihan menjadi nilai lebih dalam penyajiannya. Namun, dalam pemberitaan konflik, beberapa jurnalis melupakan etika dalam peliputan jurnalistik khususnya dalam pemberitaan konflik. Adapun tugas utama seorang jurnalis mempunyai sejumlah kelemahan pada saat peliputan konflik.¹⁵

¹⁵Anak Agung Banyu Perwira dan Nabila Sabban, *Kajian Konflik dan Perdamaian*, ed. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 127.

- 1) Kurang paham sejarah dan karakteristik konflik;
- 2) Kurangnya kemampuan menganalisa permasalahan di lapangan sehingga tidak secara mendalam memahami kasusnya;
- 3) Tidak menyiapkan draf saat hendak ke lapangan;
- 4) Lebih mengutamakan sisi konflik atau perang dan mengabaikan sisi kemanusiaan;
- 5) Tidak memikirkan dampak pemberitaan bagi pembaca;
- 6) Narasumber sering tidak jelas karena anonim;
- 7) Cenderung partisan atau memihak;
- 8) Tidak menawarkan solusi konflik;
- 9) Tidak ada proses verifikasi informasi yang didapat;
- 10) Menggunakan judul yang bombastis yang cenderung provokatif.

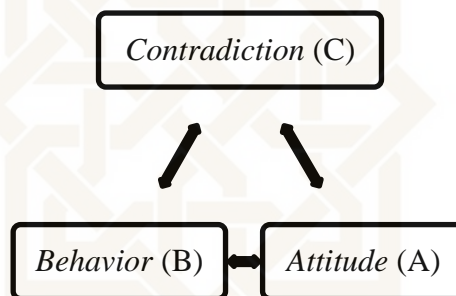
Dapat dipahami bahwa pemberitaan konflik cenderung partisan dan memihak karena beberapa faktor yang cenderung mengambil satu sisi dan sangat minim menawarkan solusi konflik. Untuk itu Johan Galtung, pencetus Jurnalisme Damai memberikan solusi ketika dalam peliputan konflik menggunakan Jurnalisme Damai.

Berbeda dengan jurnalisme perang yang hanya mempromosikan, mempertontonkan suatu konflik. Pada jurnalisme Damai berusaha menelisik ulang awal terjadinya konflik, latar belakang konflik, serta mencari solusi dan lebih manusiawi dalam pemberitaannya.

2. Jurnalisme Damai

Johan Galtung dalam modelnya menjelaskan bagaimana proses terjadinya suatu konflik. Galtung berpendapat bahwa suatu konflik dapat diproyeksikan sebagai segitiga yaitu *Contradiction* (C), *Attitude* (A), dan *Behavior* (B). Dari klasifikasi yang dikemukakan Galtung dapat digambarkan menjadi model segitiga

Tabel 1.
Model Segitiga proses terjadinya konflik ¹⁶



Dapat dijelaskan sebagai berikut :¹⁷

a. *Contradiction* (C)

Menjelaskan pokok permasalahan dalam suatu konflik termasuk perbedaan tujuan yang terjadi diantara pihak-pihak yang bertikai;

b. *Attitude* (A)

Menggambarkan persepsi atau pemahaman dan ketidakpahaman antara pihak satu dan lainnya. *Attitude* meliputi tiga aspek yaitu *emotive* (perasaan), *cognitive* (kepercayaan) dan *conative* (nafsu atau keinginan);

¹⁶*Ibid.*, hlm 8.

¹⁷Anak Agung Banyu Perwira dan Nabila Sabban (ed.), *Kajian Konflik dan Perdamaian*, , hlm. 9.

c. *Behavior* (B)

Kerjasama atau pemaksaan, bahasa tubuh yang bisa menunjukkan adanya keinginan untuk rekonsiliasi ataupun permusuhan.

Dalam kesimpulan yang dapat diambil bahwa Galtung mendefinisikan sebuah konflik harus adanya ketiga unsur tersebut. Apabila tidak ada unsur *attitude* dan *behavior* maka termasuk dalam konflik struktural. Konflik struktural itu sendiri adalah konflik yang terjadi dalam lingkup struktural yang kemungkinan besar menimbulkan tindakan ekstrem.

Diibaratkan dalam model Galtung ini, dalam suatu pemberitaan yang berbaur konflik wartawan menerapkan gaya jurnalisme kesehatan. Artinya penerapan gaya jurnalisme kesehatan dapat dicontohkan seperti penyebab penyakit tersebut, atau bagaimana metode penyembuhannya. Jadi yang dilihat bukan semata-mata bahaya dari penyakit tersebut, melainkan solusi penyembuhan.

Lain halnya ketika akan melihat jurnalisme perang seperti gaya jurnalisme olahraga atau *sport*. Gaya pemberitaan yang cenderung memihak karena ada menang dan kalah yang terkadang wartawan mengabaikan adanya resolusi dan solusi dari sebuah masalah. Dapat dipahami bahwa jurnalistik para era saat ini sangat beragam. Para jurnalis dan wartawan harus dapat membedakan pemberitaan jurnalisme damai dan jurnalisme perang, jangan sampai terjebak pada daftar kekerasan semata. Berikut perbedaan jurnalisme damai dan jurnalisme perang.¹⁸

¹⁸Simon Cottle, *Mediatized Conflict*, (New York: Open University Press, 2006), hlm. 102.

Tabel 2.
Liputan Jurnalisme Damai dan Jurnalisme Perang

No.	Jurnalisme Damai	Jurnalisme Perang
1.	Perdamaian diorientasikan	Perang diorientasikan
	Menggali formasi konflik, pihak x, tujuan y, masalah z, dan orientasi “win-win”.	Fokus pada arena konflik, dua pihak, satu tujuan.
	Buka ruang, buka waktu, sebab akibat, dan juga kajian sejarah / budaya.	Ruang dan waktu tertutup dan jalan keluar arena (mencari siapa yang menyerang lebih dulu).
	Memberikan konflik apa adanya (transparan)	Membuat perang tak transparan/rahasia
	Memberikan suara ke seluruh pihak empati dan pengertian.	Jurnalisme “kita-mereka”, propaganda, pengaruh untuk kita
	Melihat konflik atau perang sebagai masalah, fokus pada kreativitas konflik.	Melihat “mereka” sebagai masalah, fokus pada siapa yang menang dalam peperangan.
	Memanusiakan semua sisi, sisi terburuk dari senjata.	Melepaskan atribut kemanusiaan dari “mereka”, sisi terburuk dari senjata.
	Proaktif : pencegahan sebelum kekerasan atau perang terjadi	Reaktif : menunggu kekerasan sebelum memberitakan.
2.	Kebenaran Diorientasikan	Propaganda Diorientasikan
	Membeberkan ketidakbenaran dari semua sisi atau mengungkap semua yang ditutup-tutupi.	Membeberkan ketidakbenaran “mereka” atau membantu menutupi”kita atau berbohong.
3.	Golongan Masyarakat Diorientasikan	Golongan Elite Diorientasikan
	Fokus pada penderitaan secara keseluruhan; pada wanita, orang berumur, anak-anak, memberi suara pada yang tidak dapat suara	Fokus pada penderitaan “Kita” pada bagaimana elite yang sehat, menjadi penyambung bagi mereka

	Menyebut nama pelaku dalam kejahatan	Menyebut nama-nama dia yang melakukan kejahatan
	Fokus pada orang-orang yang membawa perdamaian	Fokus pada pembawa perdamaian dari kalangan elite
4.	Penyelesaian Diorientasikan	Kemenangan Diorientasikan
	Perdamaian = tidak adanya kekerasan + kreatifitas	Perdamaian = kemenangan + gencatan senjata
	Menyoroti prakarsa-prakarsa perdamaian, juga mencegah lebih banyak perang	Menutupi usaha perdamaian, seluruh kemenangan diraih
	Fokus pada struktur, budaya, masyarakat yang tentram	Fokus pada fakta, lembaga, masyarakat yang terkontrol
	Akibat : resolusi, rekonstruksi, rekonsiliasi	Pergi untuk perang yang lain, kembali jika yang lama bergejolak

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis teks pada media.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian yang akan diteliti, subjek penelitian adalah SKH Republika dan SKH Kompas sedangkan obyek penelitiannya adalah implementasi jurnalisme damai dalam pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok edisi bulan Oktober-November 2016.

3. Sumber data

Sumber data yang diperoleh peneliti adalah sumber data primer yaitu berita mengenai kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang terdiri dari SKH

SKH Republika dan SKH Kompas edisi Oktober dan November 2016. Pada SKH Republika dari bulan 26 Oktober sampai 15 November ditemukan 11 berita dugaan kasus penistaan agama hingga ditetapkan sebagai tersangka. Pada SKH Kompas dari bulan 25 Oktober sampai 16 November ditemukan 6 berita dugaan kasus penistaan agama hingga ditetapkan sebagai tersangka.

Alasan peneliti mengambil empat berita dari masing-masing media karena salah satu media memiliki jumlah pemberitaan yang sedikit mengenai kasus tersebut. Untuk itu, peneliti mengambil jumlah berita yang sama antara Republika dan Kompas. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dari populasi yang ada dan mengambil empat sampel dari masing-masing jumlah berita tersebut sesuai dengan tujuan peneliti. Pemilihan berita tersebut berdasarkan: halaman utama pada surat kabar, edisi waktu yang sudah ditentukan peneliti, dan keterkaitan dengan kasus dugaan penistaan agama.

Berikut empat berita SKH Republika:

- a. Berita 1 : Video Ahok tak Ditambah (26/10/2016);
- b. Berita 2 : SBY : Tuntaskan Kasus Ahok (3/11/2016);
- c. Berita 3 : Monas Menyerupai Medan Perang (3/11/2016);
- d. Berita 4 : Gelar Perkara Kasus Ahok Terbatas (15/11/2016).

Adapun empat berita dari SKH Kompas:

- a. Berita 5 : Basuki Beri Klarifikasi ke Bareskrim (25/10/2016);
- b. Berita 6 : Presiden Tidak Akan Intervensi (2/11/2016);
- c. Berita 7 : Presiden dan Wapres Berkantor seperti Biasa (4/11/2016);
- d. Berita 8 : Hormati Proses Hukum (17/11/2016).

4. Teknik pengumpulan data

Langkah awal dalam kegiatan penelitian adalah mengumpulkan data. Adapun peneliti menggunakan pengumpulan data *library research*. Mencermati bahasa, kalimat dalam penggunaan berita. Dan data-data yang lain sebagai pelengkap dan valid. Selain itu bersumber dari majalah, jurnal dan lainnya sebagai tambahan informasi bagi peneliti.

5. Teknik analisis data

Peneliti menggunakan analisis Robert N. Entman. Dalam analisis ini, adanya seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu.¹⁹ Dari hasil adanya penonjolan informasi, nantinya akan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas. Dijelaskan adanya proses framing sebagai berikut :

Tabel 3.
Analisis Robert N. Entman²⁰

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/ isu dilihat? sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa ang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i>	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan

¹⁹Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2002), hlm. 186.

²⁰*Ibid.*, hlm. 188.

(menekankan penyelesaian)	dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?
---------------------------	---

Untuk itu, peneliti membuat analisis data sebagai berikut:

Tabel 4.
Analisis Data

Perangkat Framing Robert N. Entman	Implementasi Jurnalisme Damai		
	Dimensi	Unit Analisis	Kategorisasi
<i>Define problem</i> (Pendefinisian masalah)	Orientasi Perdamaian	Fokus dan angel pemberitaan	melihat sebuah konflik dipandang sebagai sumber masalah saja masalah atau berusaha mencari sebuah penyelesaian.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Orientasi Golongan Masyarakat	1. Akar masalah 2. Pelaku Konflik 3. Narasumber 4. Akibat konflik	1. Menyoroti konflik tersebut terjadi dan penyebab dari konflik; 2. Wartawan menyajikan pelaku-pelaku penyebab konflik; 3. Memberikan suara masyarakat dalam peristiwa konflik tersebut; 4. Fokus pada akibat dari sebuah konflik.
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Orientasi Kebenaran	1. Keberimbangan berita; 2. Tidak adanya opini.	1. Melihat pemberitaan konflik dari semua sisi baik pihak pro maupun kontra; 2. Mengungkapkan

			pemberitaan secara benar, obyektif tanpa adanya campur tangan oleh wartawan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Orientasi Penyelesaian	1. Solusi konflik; 2. Tokoh dalam perdamaian.	1. Menyoroti bagaimana konflik dapat diselesaikan, dicegah dan adanya pesan perdamaian; 2. Wartawan memberikan tokoh dalam perdamaian di tengah-tengah konflik.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 Bab yaitu:

Bab pertama, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan;

Bab kedua, terdiri dari mengenai menelisik tentang penistaan atau penodaan agama, kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, profil Surat Kabar Harian (SKH) Republika dan profil Surat Kabar Harian (SKH) Kompas;

Bab ketiga, terdiri dari pembahasan yaitu framing berita SKH Republika, framing berita SKH Kompas, dan implementasi jurnalisme damai SKH Republika dan SKH Kompas;

Bab keempat, sebagai bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

kegiatan dari keagamaan itu, penafsiran dan kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran itu, atau yang menyebarkan kebencian dan permusuhan terhadap suatu agama.

- c. Rakhmad Zailani Kiki berpendapat penodaan agama adalah segala ucapan, tindakan, sikap yang menyakiti perasaan orang lain dengan menggunakan ayat-ayat atau ajaran agama sebagai alat untuk melecehkan.²

Dari definisi tentang penodaan agama diatas, dapat disimpulkan bahwa penistaan atau penodaan adalah segala perbuatan baik ucapan maupun tindakan yang dilakukan di khalayak umum berdampak menyakiti suatu agama dengan menggunakan ayat-ayat atau ajaran agama sebagai alat untuk melecehkan. Dalam penistaan agama, perlu dipahami bahwa penistaan agama tidak akan terjadi apabila memiliki penafsiran yang mendalam tentang agama. Pentingnya konsep penafsiran ini supaya meminimalisir adanya kasus penistaan agama. Biasanya dalam perbedaan penafsiran inilah menimbulkan beberapa kontroversi dan konflik. Menurut Ir Zeyd Amar menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan adanya kekeliruan dalam menafsirkan agama antara lain:³

- a) Subjektivitas mufasir;
- b) Kekeliruan dalam menerapkan metode dan kaidah;
- c) Kedangkalan dalam ilmu-ilmu alat;
- d) Kedangkalan pengetahuan tentang materi uraian (pembicaraan) ayat;
- e) Tidak memperhatikan konsep, baik *asbab al-nuzul*, hubungan antar ayat, maupun kondisi sosial masyarakat;

²Nuhrison M Nuh (ed.), *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2014), hlm. 247.

³*Ibid.*, hlm. 258.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan analisis kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok dengan menggunakan framing Robert N. Entman. Disimpulkan bahwa terjawab sebuah pertanyaan peneliti bagaimana implementasi jurnalisme damai pada SKH Republika dan SKH Kompas (studi pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok edisi Oktober-November 2016)?. Adapun secara umum, SKH Republika memiliki skor sebanyak 22 telah menerapkan jurnalisme damai dan 14 skor belum menerapkan jurnalisme damai. Dan untuk SKH Kompas, sebanyak 26 skor telah menerapkan jurnalisme damai dan 10 skor belum menerapkan jurnalisme damai. Berikut hasil kesimpulan implementasi jurnalisme damai pada SKH Republika dan SKH Kompas:

1. **Orientasi Perdamaian** : Dalam fokus dan angel pemberitaan, SKH Republika dan SKH Kompas sudah memenuhi kriteria jurnalisme damai yang terdapat dalam setiap pemberitaan. Republika mendefinisikan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok kepada masalah hukum dan dominasi pembicaraan utama tentang Ahok. Kompas mendefinisikan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok memiliki sisi lain yaitu sebagai masalah SARA dan pengalihan isu dengan dalih kepentingan politik dan pilkada.
2. **Orientasi Masyarakat** : Hampir semua pemberitaan baik SKH Republika dan SKH Kompas belum memberikan ruang suara bagi

masyarakat. Padahal dalam jurnalisme damai fokus kepada masyarakat dan akibat dari konflik menjadi penting karena masyarakat diorientasikan. Republika secara umum sudah menjelaskan secara terbuka dan transparan mengenai kasus dugaan penistaan agama dilihat dari akar masalah, pelaku, maupun akibat konflik. Kompas secara tersirat justru lebih berhati-hati dalam memberitakan kasus Ahok karena adanya sensitifitas masyarakat karena menyangkut isu SARA.

3. **Orientasi Kebenaran** : Secara garis besar SKH Republika dan SKH Kompas sudah melaksanakan keberimbangan berita dengan menampilkan sisi netral, pro, maupun kontra dari berbagai golongan elit saja tanpa adanya wawancara dari pihak masyarakat. Akan tetapi, Republika banyak menggunakan opini dalam pemberitannya seperti: dari 4 berita hanya 1 berita yang tidak adanya opini. Sedangkan Kompas sudah minim adanya opini dari 4 berita, hanya 1 berita adanya opini. Kompas memilih aman berdasarkan wawancara dari pihak netral seperti pihak kepolisian dan pihak-pihak yang menyerukan kenetralan.
4. **Orientasi Penyelesaian** : SKH Republika dan SKH Kompas sudah dapat menampilkan penyelesaian konflik meliputi penyelesaian kasus Ahok dengan adanya jalur hukum. Namun Republika belum memunculkan adanya tindak lanjut setelah penetapan Ahok serta belum adanya tokoh perdamaian untuk meminimalisir adanya konflik. Kompas melihat kasus Ahok mendominasi adanya pesan perdamaian melalui tokoh perdamaian

seperti: untuk tidak adanya aksi lagi dan menghimbau kepada masyarakat untuk tetap bersabar.

Jadi, kesimpulannya SKH Republika dalam implementasi jurnalisme damai sudah menerapkan sebanyak dua orientasi yaitu orientasi perdamaian dan orientasi golongan masyarakat. Sedangkan untuk SKH Kompas, dalam implementasi jurnalisme damai sudah menerapkan tiga orientasi yaitu: orientasi perdamaian, orientasi kebenaran, dan orientasi penyelesaian.

B. Saran

Setelah mendalami suatu pemberitaan dan menganalisis 4 berita di SKH Republika dan 4 berita di SKH Kompas, maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Untuk praktisi media

Untuk pekerja media baik elektronik, online, maupun cetak yang berkontribusi dalam sebuah pemberitaan, harus berusaha menerapkan jurnalisme damai. Apalagi dalam pemberitaan yang menimbulkan sensitif seperti SARA yang terfokus pada agama. Berbagai akses informasi dan data yang diperoleh oleh wartawan lantas tidak serta merta diberitakan tanpa adanya etika. Harus dibutuhkan check dan ricek dan adanya klarifikasi secara terbuka terhadap pemberitaan SARA. Jangan sampai media yang seharusnya mampu menerapkan jurnalisme damai, berada dalam posisi netral, dan tidak memihak justru menjadi bomerang terhadap peristiwa atau konflik yang lebih besar.

Diharapkan kepada media, adanya suara masyarakat sangat diperlukan dalam sebuah pemberitaan. Tidak hanya golongan elit semata yang memiliki wewenang untuk berbicara dalam suatu pemberitaan namun masyarakat juga berkontribusi menanggapi isu-isu konflik yang ada agar terciptakan pemberitaan yang seimbang. Dan media mampu menyelesaikan konflik dengan jalur perdamaian dan adanya resolusi untuk kedepannya.

2. Untuk pembaca berita

Pemahaman literasi media sangat diperlukan oleh pembaca berita. Bersikap kritis dan menyikapi suatu keadaan diperlukan saat konflik pemberitaan sangat terasa disekitar lingkungan. Bagi pembaca, jangan terpancing emosi dalam menyikapi sebuah pemberitaan yang menimbulkan konflik akan tetapi, bersikap netral. Dan hindari adanya pemberitaan *hoax* atau bohong serta beberapa konflik yang tersebar di media massa, juga harus ditanggapi dengan kritis dan netral. Beradu argumen dengan netizen di media sosial diperbolehkan akan tetapi, hindari adanya pertikaian antar pendapat.

3. Untuk penelitian selanjutnya

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Beberapa rujukan buku, jurnal, maupun akses koran masih sangat kurang mengingat buku terkait jurnalisme damai karya Johan Galtung belum peneliti temukan. Harapan peneliti dalam penelitian ini, mampu mendalami kembali analisis framing yang lain ataupun menggunakan analisis wacana yang disinkronkan dengan implementasi damai.

Peneliti menyadari jurnalisme damai dalam pemberitaan sangatlah penting karena konflik dan kejadian yang sensitif tidak akan hilang dalam kehidupan manusia. Memberikan kedamaian menjadi kewajiban setiap insan manusia agar tidak adanya lagi permusuhan maupun perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan konflik. Dan nantinya, penelitian ini menjadi bahan rujukan untuk pendalaman berita selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Anak Banyu Perwira dan Nabila Sabban, *Kajian Konflik dan Perdamaian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Alqur'an, Semua terjemah ayat al-Qur'an di skripsi ini diambil dari Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, Jakarta: Al-Huda, 2002.
- Arifin, Syifaul, "Solopos Koran Berbahasa Indonesia Terbaik ke-9", *Solopos*, <http://m.solopos.com/2015/12/31/media-berprestasi-solopos-koran-berbahasa-indonesia-terbaik-ke-9-676121>, diakses tanggal 10 Juni 2017.
- Company Profile*, Yogyakarta: Pusat Data Republika, tt.
- Cottle, Simon, *Mediatized Conflict*, New York: Open University Press, 2006.
- DEA, dkk., "Hormati Proses Hukum", *Kompas*, November 2016.
- Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2002.
- Fajar, Indah Rosalina, *Jurnalisme Damai Media Online Dalam Kasus Lurah Susan*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Gischa, Serafica Prameswari, *Jurnalisme Damai dalam Pemberitaan Surat Kabar Harian Solopos Mengenai Konflik Keraton Kasunanan Surakarta periode Mei 2012-April 2013*, Skripsi, Yogyakarta: Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014.
- INA, dkk., "Presiden Tidak Akan Intervensi", *Kompas*, November 2016.
- Jimenez, Hans Salim, "Kronologi Ahok Ditetapkan sebagai Tersangka", <http://m./news/read/2653477/kronologi-ahok-ditetapkan-sebagai-tersangka>, diakses pada tanggal 24 Juli 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: KBBI Offline, tt.
- Kompas Gramedia, <http://www.kompasgramedia.com/about-kg/history>, diakses tanggal 23 Juli 2017.
- Kompas (surat kabar)", *wikipedia.org*, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kompas_\(surat_kabar\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kompas_(surat_kabar)), diakses tanggal 10 Juni 2017.

- Likeability Is Electability? Kualitas Personal Calon Dalam Pilkada DKI Pasca-Insiden-Al-Maidah”, *Lembaga Survei Indonesia*, Desember 2016.
- Mabruroh, dan Dian Fath Risalah, "Gelar Perkara Kasus Ahok Terbatas", *Republika*, November 2016.
- Mabruroh, dan Noer Qomariah Kusumawardhani, "Kasus Ahok tetap Diproses", *Republika*, Oktober 2016.
- Mabruroh, dan Qommarria Rostanti, "Video Ahok tak Ditambah", *Republika*, Oktober 2016.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- M, Nuhriison Nuh (ed.), *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2014.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Muchtar, Umar dan Muhyidin, "SBY: Tuntaskan Kasus Ahok", *Republika*, November 2016.
- Muhammad, Ivan Agung, “Peran Media dalam Merekonstruksi Konflik dan Perdamaian :Suatu Tinjauan Psikologi Sosial”, *UIN Suska Riau*, April 2011.
- Mursyid, Fauziah, "Barekrim Proses Laporan Terkait Ahok", *Republika*, Oktober 2016.
- Nasikun, *Pokok-Pokok Agama Islam (Tinjauan Selintas)*, Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1984.
- Peta Iklan Republika”, *Republika Online*, <http://www.republika.co.id/page/about-us/peta-iklan>, diakses tanggal 25 Agustus 2017.
- Priyono, Arief, “Survei: Toleransi Beragama Orang Indonesia Rendah”, <https://m.tempo.co/read/news/2012/06/05/173408521/survei-toleransi-beragama-orang-indonesia-rendah>, diakses tanggal 23 Februari 2017.
- Rozak, Abdul, "Analisis Teks Media", bahan ajar yang disampaikan pada perkuliahan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Yogyakarta: Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga, Desember 2015.
- SAN, "Basuki Beri Klatifikasi ke Bareskrim", *Kompas*, Oktober 2016.

Setiati, Eni, *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*, Yogyakarta: C.V. ANDI OFFSET, 2005.

Setyawan, "Presiden: Aktor Politik Menunggangi", *Kompas*, November 2016.

Sularto, St., *Syukur Tiada Akhir Jejak Langkah Jakob Oetama*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2011.

Sulistiyono, Eko, *Jurnalisme Damai Dalam Narasi Pemberitaan Majalah Tempo Edisi Khusus Pengakuan Algojo 65 (1-7 Oktober 2012)*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Tholkhah, Imam, Mursyid Ali dan M. Zainuddin Daulay (eds.), *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Kehidupan Beragama, 2002.

Tim Kompas, "Presiden dan Wapres Berkantor seperti Biasa", *Kompas*, November, 2016.

Wiryono, Singgih, dan Muhyidin, "Monas Menyerupai Medan Perang", *Republika*, November, 2016.





LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tabel 1.
Analisis Berita 1 “Video Ahok tak Ditambah”
SKH Republika

Jurnalisme Damai	Unit Analisis	Implementasi Jurnalisme Damai
Orientasi Perdamaian	Fokus dan angel pemberitaan	Fokus dan angel yang didefinisikan adalah tinjak lanjut kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok.
Orientasi Golongan Masyarakat	Akar masalah	Penistaan agama menjadi akar masalah yang diberitakan Republika.
	Pelaku Konflik	Ahok sebagai pelaku konflik.
	Narasumber	Narasumber yang diungkapkan Republika berasal dari golongan elit diantaranya: Brigjen Pol Agus Andrianto, MUI, Fahira Idris (ICMI), Ahok, dan Ruhut Sitompul. Sedangkan golongan masyarakat belum dicantumkan.
	Akibat konflik	Adanya demonstrasi dan laporan kasus dugaan penistaan agama ke Polda.
Orientasi Kebenaran	Keberimbangan berita	Republika mengambil 1 dari golongan netral, 2 dari golongan kontra terhadap Ahok dan 1 dari golongan pro terhadap Ahok, berikut penjelasannya: Brigjen Pol Agus Andrianto (netral), MUI (kontra), Fahira Idris (ICMI) (kontra), dan Ruhut Sitompul (pro).
	Tidak adanya opini	Adanya pernyataan MUI bahwa Ahok telah menghina Al-Qur'an padahal pihak kepolisian belum memastikan perkara kasus Ahok.
Orientasi Penyelesaian	Solusi konflik	Di proses dalam jalur hukum.
	Tokoh dalam perdamaian	Belum terhadap tokoh perdamaian.

Tabel 2.
Analisis Berita 2 “SBY: Tuntaskan Kasus Ahok”
SKH Republika

Jurnalisme Damai	Unit Analisis	Implementasi Jurnalisme Damai
Orientasi Perdamaian	Fokus dan angel pemberitaan	Fokus dan angel dari berita ke-2 ini adalah membicarakan kasus penistaan agama oleh Ahok menurut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Orientasi Golongan Masyarakat	Akar masalah	Kasus dugaan penistaan agama menjadi akar masalah dari aksi umat muslim.
	Pelaku Konflik	Ahok menjadi pelaku utama dalam kasus dugaan penistaan agama.
	Narasumber	Dalam Republika dominasi golongan elit menjadi narasumber utama yaitu: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Presiden RI ke-6), Zainut Tauhid Sa’adi (Wakil Ketum MUI), Tito Karnavian (Kapolri). Dan belum adanya narasumber dari masyarakat.
	Akibat konflik	Adanya demosntrasi.
Orientasi Kebenaran	Keberimbangan berita	Adanya 2 golongan netral dan 1 dari golongan kontra terhadap Ahok yaitu: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Presiden RI ke-6) (kontra), Zainut Tauhid Sa’adi (Wakil Ketum MUI) (netral), Tito Karnavian (Kapolri) (netral).
	Tidak adanya opini	Adanya pernyataan “pihak-pihak yang merasa dibohongi” namun tidak adanya tindak lanjut siapa “pihak” tersebut.
Orientasi Penyelesaian	Solusi konflik	Tetap melalui jalur hukum.
	Tokoh dalam perdamaian	Belum adanya tokoh perdamaian.

Tabel 3.
Analisis Berita 3 “Monas Menyerupai Medan Perang”
SKH Republika

Jurnalisme Damai	Unit Analisis	Implementasi Jurnalisme Damai
Orientasi Perdamaian	Fokus dan angel pemberitaan	Adanya kesiapan Polri untuk mengamankan demonstrasi dan pilkada.
Orientasi Golongan Masyarakat	Akar masalah	Karena akan adanya demonstrasi besar-besaran.
	Pelaku Konflik	Massa aksi sebanyak 50 ribu orang.
	Narasumber	Dominasi golongan elit yaitu: Tito Karnavian (Kapolri), Dodo, dan Awi Setiyono (Kombes).
	Akibat konflik	Belum adanya akibat konflik karena hanya adanya kesiapan Polri.
Orientasi Kebenaran	Keberimbangan berita	Pernyataan beberapa pihak Polri yang bersifat netral yaitu: Tito Karnavian (Kapolri), Dodo, dan Awi Setiyono (Kombes).
	Tidak adanya opini	Dilihat dari judul dan narasi pemberitaan memberikan kesan monas ibarat medan perang.
Orientasi Penyelesaian	Solusi konflik	Belum adanya solusi karena hanya memaparkan persiapan.
	Tokoh dalam perdamaian	Belum adanya tokoh perdamaian.

Tabel 4.
Analisis Berita 4 “Gelar Perkara Kasus Ahok Terbatas ”
SKH Republika

Jurnalisme Damai	Unit Analisis	Implementasi Jurnalisme Damai
Orientasi Perdamaian	Fokus dan angel pemberitaan	Adanya kesiapan perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok dan adanya undangan saksi ahli dari Mesir.
Orientasi Golongan Masyarakat	Akar masalah	Dugaan penistaan agama menjadi akar masalah dari pemberitaan Republika.
	Pelaku Konflik	Ahok menjadi pelaku utama.
	Narasumber	Dominasi narasumber dari golongan elit dan satu dari kalangan masyarakat yaitu: Boy Rafli Amar (Polri), Ari Dono (Kabareskrim), Tito(Polri), Ahok, Sirra Prayuna (Tim kuasa Ahok), Anizar Masyhadi(Alumnus Universitas al-Azhar) (kalangan masyarakat), dan Zainut Tauhid Sa’adi (Wakil ketua umum MUI).
	Akibat konflik	Belum adanya akibat konflik.
Orientasi Kebenaran	Keberimbangan berita	Terdapat 5 dari golongan netral, 2 dari golongan pro terhadap Ahok, dan 1 dari golongan kontra terhadap Ahok yaitu: Boy Rafli Amar (Polri) (netral), Ari Dono (Kabareskrim) (netral), Tito(Polri) (netral), Ahok (pro), Sirra Prayuna (Tim kuasa Ahok) (pro), Anizar Masyhadi(Alumnus Universitas al-Azhar) (netral), dan Zainut Tauhid (kontra), Sa’adi (Wakil ketua umum MUI) (netral).
	Tidak adanya opini	Tidak adanya opini.
Orientasi Penyelesaian	Solusi konflik	Ahok diproses secara hukum.
	Tokoh dalam perdamaian	Belum adanya tokoh perdamaian.

Tabel 5.
Analisis Berita 5 “Basuki Beri Klarifikasi ke Bareskrim”
SKH Kompas

Jurnalisme Damai	Unit Analisis	Implementasi Jurnalisme Damai
Orientasi Perdamaian	Fokus dan angel pemberitaan	Adanya klarifikasi oleh Ahok kepada pihak Bareskrim.
Orientasi Golongan Masyarakat	Akar masalah	Akar masalah di sembuyikan oleh Kompas.
	Pelaku Konflik	Ahok menjadi pelaku atas kasus dugaan penistaan agama.
	Narasumber	Ari Dono Sukmanto (Polri), Basuki atau Ahok, Agus Andriant (Jenderal polri).
	Akibat konflik	Belum adanya akibat konflik.
Orientasi Kebenaran	Keberimbangan berita	Terdapat 2 dari golongan netral dan 1 dari golongan pro terhadap Ahok yaitu: Ari Dono Sukmanto (Polri) (netral), Basuki atau Ahok (pro), Agus Andriant (Jenderal polri) (netral).
	Tidak adanya opini	Tidak adanya opini dalam pemberitaan Kompas.
Orientasi Penyelesaian	Solusi konflik	Kasus Ahok akan diselidiki lebih lanjut.
	Tokoh dalam perdamaian	Belum adanya tokoh perdamaian.

Tabel 6.
Analisis Berita 6 “Presiden Tidak Akan Intervensi”
SKH Kompas

Jurnalisme Damai	Unit Analisis	Implementasi Jurnalisme Damai
Orientasi Perdamaian	Fokus dan angel pemberitaan	Tidak adanya intervensi dari Presiden Republik Indonesia
Orientasi Golongan Masyarakat	Akar masalah	Isu mengenai kasus Ahok disangkutpautkan dengan kepentingan politik maupun SARA.
	Pelaku Konflik	Jokowi sebagai pihak yang tidak melakukan intervensi.
	Narasumber	Adanya dominasi narasumber dari golongan elit yaitu: Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia), Ma'ruf Amin (MUI), Haedar Nashir (Muhammadiyah)bli, Wiranto, Boy Rafli Amar (Polri), Yusuf Kalla (Wapres Republik Indonesia
	Akibat konflik	Demonstrasi
Orientasi Kebenaran	Keberimbangan berita	Terdapat 6 golongan netral yaitu: Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) (netral), Ma'ruf Amin (MUI) (netral), Haedar Nashir (Muhammadiyah) (netral), Wiranto (netral), Boy Rafli Amar (Polri) (netral) , Yusuf Kalla (Wapres Republik Indonesia (netral)
	Tidak adanya opini	Terdapat pernyataan “Kalla mengaku tidak percaya Yudhoyono melakukan hal itu” akan tetapi tidak adanya kelanjutan atau klarifikasi dari SBY terkait tindakannya.
Orientasi Penyelesaian	Solusi konflik	Kasus Ahok tetap dilanjutkan ke jalur hukum.
	Tokoh dalam perdamaian	Haedar Nashir (Muhammadiyah) sebagai tokoh perdamaian yang menyampaikan seperti: “Karena hanya hukum yang adil yang bisa menengahi situasi yang sedang memanas ini”.

Tabel 7.
Analisis Berita 7 “Presiden dan Wapres Berkantor seperti Biasa”
SKH Kompas

Jurnalisme Damai	Unit Analisis	Implementasi Jurnalisme Damai
Orientasi Perdamaian	Fokus dan angel pemberitaan	Tidak perlu adanya kekhawatiran mengenai adanya demonstrasi.
Orientasi Golongan Masyarakat	Akar masalah	Adanya demonstrasi besar-besaran
	Pelaku Konflik	Jokowi menjadi sorotan utama dan menyembuyikan pelaku konflik.
	Narasumber	Adanya dominasi narasumber dari golongan elit yaitu: Jokowi (Presiden Republik Indonesia), Yusuf Kalla (Wapres Republik Indonesia), Helmy Faishal (Pengurus Besar NU), Haedar Nashir (Pimpinan Pusat Muhammadiyah), Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Kemaritiman), M Iriawan (Kepala Polda), Rizieq Syihab (FPI), Ari Dono (Kepala Bareskrim).
	Akibat konflik	Tidak memunculkan adanya akibat dari konflik.
Orientasi Kebenaran	Keberimbangan berita	Terdapat 7 dari golongan netral dan 1 dari golongan kontra terhadap Ahok yaitu: Jokowi (Presiden Republik Indonesia) (netral), Yusuf Kalla (Wapres Republik Indonesia) (netral), Helmy Faishal (Pengurus Besar NU) (netral), Haedar Nashir (Pimpinan Pusat Muhammadiyah) (netral), Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Kemaritiman) (netral), M Iriawan (Kepala Polda) (netral), Rizieq Syihab (FPI) (kontra), Ari Dono (Kepala Bareskrim) (netral).

	Tidak adanya opini	Tidak adanya opini dalam pemberitaan Kompas.
Orientasi Penyelesaian	Solusi konflik	Aksi berjalan damai dan tidak adanya intervensi dari Presiden.
	Tokoh dalam perdamaian	Haedar Nashir (Pimpinan Pusat Muhammadiyah) menjadi tokoh perdamaian dalam ucapannya seperti: “mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing isu yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, sikap tenang dan berfikir jernih dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi menjadi wajib dimiliki”.

Tabel 8.
Analisis Berita 8 “Hormati Proses Hukum”
SKH Kompas

Jurnalisme Damai	Unit Analisis	Implementasi Jurnalisme Damai
Orientasi Perdamaian	Fokus dan angel pemberitaan	Pencalonan Ahok yang tidak gugur setelah ditetapkan sebagai tersangka dan adanya apresiasi polisi dalam menangani kasus Ahok.
Orientasi Golongan Masyarakat	Akar masalah	Kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok.
	Pelaku Konflik	Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.
	Narasumber	Adanya dominasi narasumber dari golongan elit yaitu: Sumarno (Ketua KPU), Ari Dono Sukmanto (Polri), Din Syamsuddin, Jokowi, Haedar Nashir (Ketua Umum Muhammadiyah), Djarot Saiful Hidayat, Sirra Prayuna (Tim Hukum Basuki), Hasto Kristiyanto (PDI-P), Agus Harimurti Y, Anies Baswedan. Belum adanya narasumber dari golongan masyarakat.
	Akibat konflik	Tidak adanya akibat konflik.
Orientasi Kebenaran	Keberimbangan berita	Terdapat 7 dari golongan netral, 3 dari golongan pro terhadap Ahok, dan 1 dari golongan kontra terhadap ahok yaitu: Sumarno (Ketua KPU) (netral), Ari Dono Sukmanto (Polri) (netral), Din Syamsuddin (netral), Jokowi (netral), Haedar Nashir (Ketua Umum Muhammadiyah) (netral), Djarot Saiful Hidayat (netral), Sirra Prayuna (Tim Hukum Basuki) (pro), Hasto Kristiyanto (PDI-P) (pro), Agus Harimurti Y (netral), Surya Paloh (pro), dan

		Ahmad Muzani (Partai Gerindra) (kontra).
	Tidak adanya opini	Belum adanya opini.
Orientasi Penyelesaian	Solusi konflik	Tidak adanya aksi lagi,
	Tokoh dalam perdamaian	Din Syamsudin dan Haedar menjadi tokoh perdamaian. Berikut pernyataan Din Syamsudin: “mengimbau umat Islam agar tidak melakukan aksi-aksi lanjutan, termasuk dengan adanya rencana Aksi Bela Islam 25 November. Umat diharapkan sabar menanti proses hukum”. Dan berikut pernyataan dari Haedar: “berharap semua elemen bangsa tidak terpecah karena kasus ini”.

Video Ahok tak Ditambah

● MABRUROH, QOMMARRIA ROSTANTI

Ahok membenarkan videonya terkait al-Maidah 51.

JAKARTA — Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) sudah mengeluarkan hasil pemeriksaan video dugaan penistaan agama yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Meskipun dipotong, video yang beredar di media sosial itu tetap asli dan tidak ada penambahan.

"Kami tidak menemukan penambahan. Meskipun dipotong, video itu tetap menggambarkan apa adanya," ujar Direktur I Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agus Andrianto, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/10).

Hasil analisis Puslabfor sudah diklarifikasi Gubernur DKI Jakarta. Ahok membenarkan videonya terkait surah al-Maidah 51. Tidak ada penambahan dalam video yang telah dipotong tersebut.

Penyelidikan dugaan penistaan agama akan terus dilanjutkan. Langkah selanjutnya adalah mendatangkan saksi ahli, di antaranya ahli bahasa, ahli agama, dan ahli pidana. Tujuannya untuk mendapatkan keterangan objektif dan mengkaji dari berbagai sisi terkait surah al-Maidah ayat 51.

Sebelumnya, MUI berfatwa apa yang diucapkan Ahok saat berada di Kepulauan Seribu memang telah dikategorikan menghina Alquran dan ulama. Hal ini berkonsekuensi hukum. Andrianto menjelaskan, yang akan diminta keterangan tidak hanya MUI. "Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama juga akan kita mintakan keterangan," ujarnya.

Penyidik juga akan menyambangi beberapa tokoh agama untuk mendapatkan keterangan seputar penjelasan ayat tersebut. Tujuannya untuk mendapatkan masukan yang berimbang terkait dugaan penistaan agama.

Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mendukung proses penegakan hukum ini. Ketua Bidang Koordinasi Pengembangan Profesionalitas Tenaga Kerja ICMI, Fahira Idris, menjelaskan, kasus hukum ini bukan perkara biasa

karena sudah menjadi isu nasional harus cepat mengusut kasus ini agar memenuhi rasa keadilan.

Kesigapan Polri mengusut kasus menunjukkan semua orang sama di hukum. Kapan pun ada dugaan pelanggaran hukum, Polri harus segera prosesnya. Sebab, jika tidak, akan berdampak besar bagi stabilitas keam

Fahira menyebut, saat ini yang tuhkan Polri adalah kepercayaan. berharap Polri menjadikan kebenaran keadilan sebagai satu-satunya ukuran dalam mengusut kasus yang menjadi s an umat Islam di Indonesia ini. Pihak mengimbau masyarakat bersama-s mengawal pengusutan kasus tersebut tetap berada di dalam koridornya.

Fahira mengatakan, reaksi um nanggapi kasus ini lewat koridor dan aksi damai menunjukkan ke yaan tinggi Indonesia sebagai nega kum. Hukum menentukan yang be kutan salah atau tidak. "Ayo terus suara agar polisi tetap profesional menangani kasus ini," ujar Fahira.

Gubernur DKI Jakarta menuai ke an keras karena ucapannya yang an menyinggung SARA (suku, agama dan antargolongan). Kasus tersebut mula ketika Ahok mengadakan kumpul ke Kepulauan Seribu pada 27 Septe lalu. Di sana, Ahok sempat menyam kan arahan di hadapan masyarakat pat. "Bisa saja dalam hati kecil Bagai enggak bisa pilih saya, ya kan dibat pakai surah al-Maidah: 51 macam-ma itu," ujar Ahok ketika itu.

Pernyataan tersebut muncul rekaman video berdurasi satu jam menit, 33 detik yang diunggah ake tube Pengantar DKI berupa "Surat Guf Basuki Tjahaja Purnama Komunitas Seribu dan Rangka Rupa SARA" di Kalimat berisi SARA itu terdengar menit ke-24 dari detik ke-15-23.

Video ini memicu aksi demon puluhan ribu umat Islam di berbe wilayah. Sejumlah kelompok m melaporkan kasus ini ke sejumlah p. Juru bicara Ahok-Djarot, Ruhut S m membantah kalau Ahok menyebut al-Maidah bohong. Menurut Ruhut orang yang sengaja memelintir pemy an Ahok untuk memainkan isu S "Padahal, isu SARA sekarang itu su gak laku. Masyarakat sudah ceri katanya. ■ ahmad islamy jamil ed: erdy na

SBY: TUNTASKAN KASUS AHOK



APEL KESIAPSIAGAAN Pasukan Asmaul Husna Polri saat mengikuti apel kesiapsiagaan pengamanan pilkada serentak 2017 di Lapangan Silang M. Y. (2/11). Pasukan tersebut bakal didandani dengan kopiah dan serban guna menghadapi aksi unjuk rasa ormas Islam pada Jumat (4/11).

● UMAR MUCHTAR, MUHYIDIN

Kapolri menilai tuntutan kepada Jokowi tak lagi diperlukan.

JAKARTA — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal rencana demonstrasi akbar menuntut penegakan hukum atas dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kemarin. SBY menekankan, akar pemicu unjuk rasa tersebut mesti dituntaskan agar suasana kembali adem.

"Mari bertanya, sebenarnya apa masalah yang kita hadapi ini, dan mengapa di seluruh Tanah Air rakyat melakukan protes dan unjuk rasa? Tidak mungkin tidak ada sebab, maka mari lihat dari sebab-akibat," ujar dia dalam konferensi pers di Cikeas, Bogor, Rabu (2/11). SBY kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali pada awal mula kasus Ahok yang dianggap menistakan agama.

Ia menekankan, kasus tersebut harus mengacu pada sistem hukum dan KUHP. Di Indonesia, menurut dia, sudah ada yurisprudensi dan preceden penanganan hukum.

yang menunjukkan Ahok mengatakan ada pihak-pihak yang membohongi rakyat dengan surah al-Maidah ayat 51.

Ahok telah menyatakan permintaan maaf atas kasus tersebut. Meski begitu, sejumlah pihak dari kalangan umat Islam merasa hal itu belum cukup. Beberapa ormas kemudian menginisiasi aksi unjuk rasa besar-besaran besok. Mereka mengadagadag sebanyak 200 ribu orang dari berbagai daerah akan ikut serta.

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi menyatakan, Presiden Joko Widodo telah menjanjikan tak bakal mengintervensi kasus Ahok saat menemui para ulama di Istana Negara, Selasa (1/11). "Presiden sudah menegaskan kepada kapolri untuk terus mengusut tuntas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Saudara Ahok," kata Zainut.

Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi secara terbuka dari Presiden soal klaim itu. Pernyataan publik Jokowi terkait aksi unjuk rasa sejauh ini hanya permintaan agar para pengunjuk rasa tak memaksakan kehendak dan merusak. Ia juga memerintahkan aparat keamanan menindak jika ada terjadi aksi anarkistis.

Sedangkan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai Presiden Joko Widodo sudah melakukan hal yang dituntut para demonstran dalam pert-

Jokowi membenarkan Ahok tak bisa dipenuhi Presiden sebagai pimpinan eksekutif. "Itu adalah teknis hukum yang menjadi domain dari yudikatif," ujar Tito. Ia menekankan, kepolisian sudah melakukan langkah-langkah proses penegakan hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok.

Upaya penegakan hukum terhadap Ahok juga diserukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah, dan NU. Secara institusional, tak akan mengikuti.

■ singgih wiryon

REKAYASA LALIN 4 NOVEMBER



besaran besok. Mereka menggadang-gadang sebanyak 200 ribu orang dari berbagai daerah akan ikut serta.

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi menyatakan, Presiden Joko Widodo telah menjanjikan tak bakal mengintervensi kasus Ahok saat menemui para ulama di Istana Negara, Selasa (1/11). "Presiden sudah menegaskan kepada kapolri untuk terus mengusut tuntas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Saudara Ahok," kata Zainut.

Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi secara terbuka dari Presiden soal klaim itu. Pernyataan publik Jokowi terkait aksi unjuk rasa sejauh ini hanya permintaan agar para pengunjung rasa tak memaksakan kehendak dan merusak. Ia juga memerintahkan aparat keamanan menindak jika ada terjadi aksi anarkistis.

Sedangkan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai Presiden Joko Widodo sudah melakukan hal yang menuntut para demonstran dalam pertemuan dengan para ulama. "Jadi tidak perlu lagi demo ke istana," ujarnya.

Tito menganggap, tuntutan agar



Monas Menyerupai Medan Perang

OLEH SINGGIIH WIRYONO, MUHYIDIN

Sejenak, Monas seperti berubah menjadi pangkalan militer, Rabu (2/11). Sejumlah mobil antihuru-hara Baracuda dan mobil meriam air berjejer rapi. Pasukan dengan kuda-kuda yang tinggi menjulang berdiri siaga. Anjing-anjing pelacak memamerkan taringnya. Belasan tenda berjejer di lapangan Silang

Monas dari kesatuan Brimob Polri. Terlihat pula bus pengangkut personel Brimob.

Suara teriakan komandan barisan terdengar memekakkan telinga. Barisan prajurit dan personel polisi berseragam lengkap tampak berbaris rapi. Kuning, abu-abu, dan loreng khas tentara. Lenyap sudah kesan Monas yang adem dan santai yang biasa dirasakan warga.

Ribuan prajurit dan personel

serta alat-alat dan perlengkapan pengamanan kemarin kan guna mengikuti apel menjelang pelaksanaan serentak 2017. Apel itu digelar untuk persiapan penunjuk rasa pada Jumat.

Apel itu dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI M. Rycko D. Koster.

Dalam kesempatan, Panglima TNI M. Rycko D. Koster menyampaikan pesan-pesan

Bersambung ke

pengkomodasi kepastian lapangan tenaga kerja lokal. Sebab, pemerintah belum mampu melakukan pengawasan yang baik terkait masuknya TKA ke Indonesia, khususnya di level buruh.

"Misalnya, dalam merespons adanya MEA, pemerintah itu tidak paham. Artinya, *kan* dalam MEA disebutkan bakal ada arus bebas tenaga kerja terampil. Istilah terampil ini yang pemerintah lupa menyebut. Semua-

takan, jika ada tenaga kerja yang membutuhkan keahlian TKA, perusahaan-perusahaan harus menjabarkan keahlian yang dibutuhkan. Hal ini bukan hanya ditujukan untuk TKA asal Cina, melainkan juga negara-negara lain.

Transfer ilmu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Nur-

annya, tentu jumlah pengangguran semakin berkurang.

Pada sisi lain, pemda dan pengembang proyek seharusnya bisa melakukan kerja sama untuk mendorong tenaga kerja lokal memiliki keahlian tertentu, yang awalnya hanya dimiliki TKA. Dengan transfer ilmu, pada kemudian hari, tenaga kerja lokal akan semakin berkembang.

■ lantar satria ed: muhammad iqbal

berlanjut ke televisi. Program Bagito Show yang disingkat Basho begitu mahsyur pada 1990-an.

Memasuki 2000-an, aktivitas kelompok ini vakum. Tepatnya pada 2002.

Miing mulai berpolitik via PDI Perjuangan. Puncaknya tentu ketika dia terpilih sebagai anggota DPR periode 2009-2014.

Sementara, Unang dan Didin tetap di dunia hiburan. Aksi

penonton), katanya.

Materi yang komunikatif, lanjut Tarzan, ialah materi yang terhubung dan dekat dengan para penonton. Berkumpulnya Bagito kembali setelah 14 tahun vakum diharapkan Tarzan dapat menjadi angin segar bagi dunia komedi di Indonesia.

Meski sudah lama vakum, Tarzan optimistis Bagito akan menghidupkan kembali humor khas yang cerdas dan lekat

disapa mara ta... momen ulang ta... Bagito akan men... para pelawak se... Indonesia. Ia ber... akan dapat mere...

Perihal masa... belantika komed... Indro optimistis... Bagito telah men... spesifik yang tel... dirikan ketenaran... sebut. ■ ed: muha...

Monas Menyerupai Medan Perang dari hlm 1

Tito dan Gatot meninjau langsung kesiapan pasukannya ke sejumlah barisan. "Tidak bawa senjata api *kan*? Kalau ada yang lakukan tindak kejahatan bagaimana!" kata Tito membentak kepada salah satu anggota TNI. "Tidak jenderal! Akan ditindak sesuai dengan pengamanan dan perintah perparanglima," jawab anggota TNI.

Dalam apel tersebut, tak hanya anggota TNI dan Polri, tapi juga terdapat anggota Satpol PP, pasukan berkuda, dan polisi yang memakai serban putih. Saat Jenderal Tito datang, puluhan polisi yang menggunakan serban putih dan kopiah putih tersebut terus membacakan Asmaul Husna alias nama-nama mulia Yang Mahakuasa.

Tito mengatakan, apel tersebut dilaksanakan untuk mengawal pilkada serentak di seluruh negeri, termasuk demo

yang akan dilaksanakan ormas Islam di Istana Negara, Jumat (4/11). Menurut dia, apel tersebut diikuti sebanyak 4.000 personel gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP. "Hari ini ada 4.000. Untuk hari Jumat itu, lebih kurang 18 ribu. Jadi yang digelar hari ini, seperempat atau seperlimanya tidak dihadirkan semuanya," ucap dia. Sebanyak 18 ribu pasukan Brimob tersebut didatangkan dari 17 daerah.

Menjelang siang hari, apel dibubarkan. Sebagian prajurit balik kanan ke barak masing-masing. Kendati demikian, tenda-tenda tak dibongkar. Kebanyakan tenda-tenda tersebut dibangun dalam kawasan Tugu Monas, tepatnya di depan Istana Presiden. Di dalam setiap tenda, setidaknya terdapat sekitar 20 tempat tidur kain yang bisa dilipat. Sementara di depannya, banyak handuk

yang bergantung.

Menjelang magrib, kemarin, tampak sejumlah anggota Brimob melepas lelah. Bersantai sembari duduk-duduk di pagar besi pintu Monas. Tak jauh dari mereka, sekitar 10 truk Brimob tampak berderet teratur.

Seorang anggota Brimob dari Batalion Cirebon, Bripka Dodo, terlihat sedang menghirup udara segar setelah seharian bertugas sebagai sopir mengantar-jemput sekitar 400 ratusan anggota, yang menginap di puluhan tenda berwarna hitam itu.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan *Republika*, setidaknya ada tiga kompi yang sudah mulai menginap di tenda-tenda itu. Masing-masing kompi terdiri atas seratus anggota lebih.

Karena banyaknya jumlah tersebut, mereka mengalami kesulitan saat hendak member-

sihkan diri. Walaupun begitu, menurut Dodo, kebutuhan makan sangat tercukupi karena sudah disiapkan oleh atasannya.

Ia mengatakan, dalam sehari setiap anggota akan diberikan jatah lima bungkus nasi, yang dibagikan pagi, siang, dan malam. Sehingga, saat melakukan pengamanan 'Aksi Bela Islam' besok, para anggota benar-benar sudah siap.

Dodo mengatakan, sudah mulai menginap di kamp yang serupa perkemahan itu sejak Ahad (30/10). Selama empat hari itu, ia tak lupa memberi kabar kepada keluarganya yang ada di Cirebon. "Kita *kan* juga punya keluarga. Tiap hari, saya kasih informasi biar mereka tidak khawatir," ujar Dodo saat berbincang dengan *Republika*.

Setelah azan magrib selesai dikumandangkan, Dodo ditangi dua orang temannya yang juga sama-sama dari Cirebon. Mereka kemudian berjalan

sekitar dua kilometer menuju sebuah pos polisi untuk mandi.

Di sekitar tenda, tampak sebuah mushala yang juga dibangun dari tenda. Setelah azan isya berkumandang, puluhan anggota Brimob melaksanakan shalat berjamaah dengan dua saf lebih. Selesai shalat, mereka tak lupa membaca Asmaul Husna bersama-sama.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono mengatakan, tenda-tenda tersebut memang sengaja disiapkan untuk menampung personel yang datang di daerah, seperti Polda Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Banten. Pasalnya, menurut dia, demo kali ini membutuhkan pengamanan ekstra melihat banyaknya massa aksi, yaitu sekitar 50 ribu orang.

Tenda-tenda tersebut dilengkapi dengan sarana dan prasarana serupa dengan yang didirikan di Monas. "Tenda itu

kita bagi-bagi ur... ini, ada 26 titik k... pengamanan. Ki... di Ibu Kota, ke da... yang kita kira ray... guan Kamtibmas... langsungnya der...

Terlepas dar... serupa persiapa... rin, Monas masih... yang menyenangkan... wisata. Hilir mud... terus terjadi. An... masih riang men... mengagumi keti... men. Para penju... warkan jajanan d... rezeki.

"Mari Kakak... esnya!" kata sala... penjual. Seluruh... rapkan kedamai... pemandangan ra... dan petugas, ten... kendaraan temp... mata seperti her... menandakan ke... terburuk. ■ ed: fil...

Gelar Perkara Kasus Ahok Terbatas

● MABRUROH, DIAN FATH RISALAH

Universitas al-Azhar Mesir disebut panggilan calon saksi ahli.

JAKARTA — Pihak Mabes Polri menyatakan siap melaksanakan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Selasa (15/11) ini. Kepolisian juga mengungkapkan adanya rencana mendatangkan ulama dari Mesir dari pihak terlapor sebagai saksi ahli.

Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, gelar perkara akan dilakukan di Ruang Utama (Rupatama) Mabes Polri pada Selasa (15/11), pukul 09.00 WIB. "Gambarannya, pertama pembukaan oleh pimpinan gelar. Pimpinan gelar ini adalah Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono," ujar Boy di Mabes Polri, Senin (14/11).

Boy mengatakan, akan dilakukan pemaparan oleh penyidik tentang perkara yang saat ini ditangani oleh Bareskrim Polri. Selanjutnya, menurut Boy masyarakat yang menyampaikan laporan juga diberi kesempatan memberikan penjelasan terhadap

laporannya.

Setelah itu, akan dilanjutkan oleh saksi ahli agama, saksi ahli pidana, dan saksi ahli bahasa. Menurut Boy, keputusan penyidik soal layak-tidaknya kasus ditingkatkan ke tingkat penyidikan dengan penetapan tersangka akan diumumkan pada Rabu (16/11) atau selambatnya, Kamis (17/11). "Mari kita ikuti bersama, dengan tertib, tanpa perlu ada pengerahan massa," katanya.

Ahok dilaporkan ke Bareskrim Polri atas pernyataan yang ia lontarkan dalam kunjungan kerja di Kepulauan Seribu, September lalu. Dalam rekaman pidatonya pada kunjungan itu, Ahok terekam menyatakan, warga Jakarta jangan mau dibohongi "pakai" surah al-Maidah ayat 51.

Pihak Mabes Polri juga mengungkapkan rencana pihak terlapor mendatangkan ulama dari Universitas al-Azhar Mesir, Syekh Amru al-Wardani, untuk menjadi saksi ahli. "Jadi yang dari terlapor *ngambil* dari Mesir. Ya, silakan, *nggak* ada masalah," ujar Tito di Mako Brimob, Depok, kemarin.

Jika jadi datang, menurut Kapolri, para saksi ahli akan didengar keterangannya pada gelar perkara hari ini. Ia juga menyatakan, gelar perkara nanti tak akan dilakukan secara ter-

buka. "Nanti kita akan berikan kesempatan wartawan untuk meliput dulu, kemudian baru (mulai gelar)," ujar dia.

Sementara itu, Ahok tetap meyakini dirinya tidak bersalah atas tuduhan penistaan agama. "Tapi, kalau dijadikan tersangka pun saya percaya polisi memutuskan yang baik dan pasti secara profesional, jadi saya akan terima," tutur Ahok, di Balai Rakyat Rumah Lembang, Jakarta Pusat, kemarin.

Ia menginginkan kasus penistaan agama ini segera dilimpahkan ke pengadilan bila jadi tersangka. "Nanti, waktu di pengadilan semua bisa *live*, bisa melihat dan, saya percaya, saya tidak bersalah," katanya menegaskan.

Terkait rencana mendatangkan ulama al-Azhar, Ketua Tim Kuasa Hukum Ahok, Sirra Prayuna, belum mau berkomentar. Saat dihubungi *Republika*, ia menyatakan masih sibuk menyiapkan beberapa hal untuk gelar perkara hari ini.

Alumnus Universitas al-Azhar Kairo, Anizar Masyhadi, mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan orang dekat Grand Syekh al-Azhar Ahmad Thayyib terkait kehadiran Syekh Amru al-Wardani di Indonesia. Berdasarkan komunikasi itu, Ahmad Thayyib meminta Amru al-Wardani yang dikenal sebagai ketua

pelatihan lembaga tidak mencampuri urusan Indonesia. "Ini hasil koordinasi Syekh Amru al-Wardani sudah di Indonesia untuk segera kembali. Anizar Masyhadi, yang Ahmad Thayyib selamatkan di Indonesia pada kepada *Republika*, ke-

Awalnya, menurut Syekh Ahmad Thayyib, kedatangan tersebut untuk negosiasi. Namun, berita Amru al-Wardani sebagai saksi meri-

Wakil Ketua Umum Tauhid Sa'adi menegaskan, ulama di Indonesia peten menjadi saksi an penistaan agama jauh-jauh tanya ulama Indonesia juga ada ya seperti itu (*non-Muslim mimpin—Red*)," ujar

Namun, ia menekankan persoalan MUT sem Ahok yang memasuki orang lain. Ahok, menyampaikan ayat yang tak ia imani dengan pemahaman penyidik soal tafsir. Salah kata dia. ■ qommaria n ed: Fitriyan zamzami

Indepth

Pro-Kontra

Sentimen Kasus
Ahok Minim

Hlm— 8

Anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha, Sarman Simanjorang, menyatakan, kalangan pengusaha menawarkan UMP Rp 3,3 juta dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Formula penghitungan berdasarkan peraturan itu, yakni UMP tahun berjalan

UMP 2017.

Dalam kesempatan itu, Basuki menyatakan, pihaknya telah surat kepada Kementerian Ketenagakerjaan terkait penetapan UMP 2017. Pemprov DKI Jakarta berharap bisa menetapkan besaran UMP dengan formula yang memperhitungkan KHL untuk mengakomodasi keinginan pe-

Basuki. Setelah menguasai stok beras dan daging melalui badan usaha milik daerah, PT Food Station Tjipinang Jaya dan PD Dharma Jaya, Pemprov DKI berencana membangun pusat perkulakan di Kramatjati, Jakarta Timur. Cara ini dinilai efektif menekan harga kebutuhan pokok di Jakarta.

(MKN)

DUGAAN PENISTAAN AGAMA

Basuki Beri Klarifikasi ke Bareskrim

JAKARTA, KOMPAS — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahjaja Purnama mengklarifikasi pernyataannya terkait dugaan penistaan agama ke penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI, Senin (24/10). Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto menegaskan, keterangan Basuki tidak bersifat *pro justitia* sehingga penyidik merencanakan untuk meminta keterangan Basuki terkait penyelidikan kasus tersebut beberapa waktu mendatang.

"Saya datang untuk memberikan klarifikasi. Harapannya, penyidik kepolisian memiliki bahan untuk penyelidikan kasus dugaan penistaan agama," kata Basuki di gedung sementara Bareskrim Polri, kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin.

Basuki mendatangi Gedung Bareskrim pukul 10.20. Ia memberikan keterangan di lantai 2, tepatnya di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim. Sekitar pukul 12.45, Basuki selesai memberikan keterangan kepada penyidik.

Ia menegaskan, dirinya menghormati seluruh pihak. Alhasil, Basuki tidak pernah bermaksud menyinggung ulama melalui per-

nyataannya di Kepulauan Seribu, September.

"Saya tidak mungkin menistakan Al Quran karena saya percaya semua orang beriman pasti percaya kitab sucinya, tidak ada niat saya untuk menyinggung ulama. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini," ujarnya.

Hal itu diakui Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigadir Jenderal (Pol) Agus Andrianto. Agus menyatakan, penyidik bersifat mendengar sejumlah klarifikasi Basuki atas sejumlah pelaporan terkait pertemuan Basuki dengan warga di Kepulauan Seribu. "Beliau datang ke sana untuk melihat situasi dan kondisi, apa yang sedang dilaporkan sejumlah pihak tentang kejadian di Kepulauan Seribu. Intinya, beliau menjelaskan dan mengklarifikasi kejadian sebenarnya di sana," ujar Agus.

Ari menambahkan, penyidik Bareskrim belum memanggil Basuki untuk diperiksa sebagai saksi terkait pernyataannya yang diduga menistakan agama. Penyidik hanya mendengar klarifikasi Basuki sehingga keterangan itu tidak bersifat *pro justitia* dan belum dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

"Kegiatan kami (penyidikan

kasus penistaan agama) masih melengkapi bukti dan saksi-saksi. Kemungkinan beliau (Basuki) akan dipanggil untuk dimintai keterangan," kata Ari.

Ari memastikan penyelidikan kasus itu tetap berlangsung sebagai langkah Bareskrim memberikan pelayanan kepada publik.

Pemeriksaan video

Agus mengatakan, pihaknya telah memeriksa dua video terkait kasus itu, yaitu potongan video yang beredar di media sosial serta video utuh yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Keaslian video kami uji. Dari hasil analisis sementara, tidak ada video yang diedit atau disisipi," kata Agus terkait video yang tersebar di media sosial.

Namun, analisis itu belum final. Agus menegaskan, pihaknya masih menunggu hasil kajian laboratorium digital forensik Polri untuk menentukan keaslian konten dalam potongan video yang menjadi bahan laporan terhadap Basuki.

Hingga kini penyidik telah memeriksa 10 saksi. Pada pekan ini, penyidik akan meminta keterangan sejumlah ahli, seperti ahli agama, bahasa, dan pidana.

(SAN)

Presiden Tidak Akan Intervensi

SBY Temui Wapres dan Wiranto

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo tak akan mengintervensi penanganan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama. Presiden juga tak menghalangi aksi unjuk rasa, tetapi hal itu harus dilakukan secara damai dan sesuai aturan.

Presiden meyakini, ulama selalu membawa kabar baik serta menjaga dan memberikan tun-tunan kepada umat.

"Marilah bersama-sama kita jaga, kita pelihara, kita perju-angkan keindonesiaan kita," ujar Presiden saat bertemu sejumlah ulama dan pemimpin organisasi massa Islam di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/11).

Selain Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin, hadir dalam pertemuan antara lain Ketua Umum Pim-pinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dan Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar

Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj. Sementara Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; serta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Final

Seusai pertemuan, Ma'ruf mengatakan, bagi ulama, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah final. Ulama tidak akan memberikan toleransi ter-hadap siapa saja yang akan me-mecah belah bangsa.

(Bersambung ke hal 15 kol 5-7)

Presiden Tidak Akan Intervensi

(Sambungan dari halaman 1)

Haedar mengatakan, semua ormas Islam memiliki pandangan yang sama untuk tetap merawat komitmen kebangsaan dan menjaga keindonesiaan sesuai cita-cita pendiri bangsa. "Jangan sampai komitmen itu terganggu oleh situasi politik tertentu seperti pilkada. Harganya terlalu mahal," katanya.

Harapan untuk menjaga dan mempertahankan keberagaman bangsa Indonesia juga disampaikan sejumlah tokoh dan pegiat gerakan masyarakat sipil dengan membuat petisi berjudul "Jangan rusak pilkada dengan isu SARA!"

Petisi yang kemarin siang diluncurkan di change.org itu antara lain ditandatangani Franz Magnis-Suseno (Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara), Allisa Wahid (pegiat Gusdurian), Hendardi (Ketua Badan Pengurus Setara Institute), Yudi Latif (pemikir kebangsaan dan kenegaraan), KH Husein Muhammad (pengasuh Pondok Pesantren Dar Al Tauhid Cirebon), Karlina Supelli (akademisi STF Driyarkara), Rumadi Ahmad (Lakpesdam NU), dan Nia Sjafirudin (Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika).

Dalam petisi itu, antara lain dinyatakan bahwa penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam proses pilkada di Jakarta dan di daerah lainnya menggambarkan lemahnya kualitas demokrasi Indonesia dan kemunduran serius praktik penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

Hingga semalam, petisi itu telah ditandatangani 9.639 orang. Dalam petisi itu, Wahyu Gunawan, misalnya, menulis: NKRI bukan milik salah satu golongan

arkan itu diselesaikan lewat jalur hukum. Karena hanya hukum yang adil yang bisa menengahi situasi yang sedang memanas ini," katanya.

Presiden, menurut Haedar, mempersilakan aparat mengusut dugaan penistaan agama oleh Basuki. "Beliau tidak berniat, apalagi melakukan langkah untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Keinginan Presiden kita sambut baik," katanya.

Menurut Wiranto, saat bertemu dengan para ulama, pemerintah menjelaskan perkembangan proses hukum kasus dugaan penistaan agama tersebut.

"Kapolri sudah melaporkan proses sedang berjalan, bahkan sebelum dipanggil, Gubernur (Basuki) sudah datang sendiri ke kepolisian dan sudah diproses," tuturnya.

Pemerintah berharap masyarakat memahami bahwa proses hukum memerlukan tahapan, termasuk pemeriksaan saksi-saksi. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat menunggu dengan tenang dan tidak resah.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menyatakan, Polri telah mengagendakan gelar perkara penyelidikan kasus tersebut pada pekan ini. Hasil gelar perkara akan menentukan kelanjutan pengusutan kasus tersebut, termasuk keperluan penyidik untuk memeriksa Basuki.

Dalam pengusutan kasus ini, Polri telah memeriksa 15 saksi serta sebanyak lima ahli, seperti ahli bahasa dan ahli hukum pidana. Penyidik masih merencanakan meminta keterangan dari empat ahli lainnya, di antaranya ahli agama. Pemeriksaan ahli ini diharapkan juga rampung pada pekan ini.

sampai kebebasan mengungkapkan pendapat itu mengganggu kebebasan orang lain.

"Hendaknya penyampaian pendapat itu disampaikan sesuai dengan rambu-rambu, peraturan yang ada. Jangan sampai ada yang merusak, menocok, atau warga takut," kata Wiranto usai bertemu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang datang ke kantornya, kemarin siang. Saat itu, Yudhoyono tidak memberi pernyataan kepada wartawan yang menunggunya.

Seusai menemui Wiranto, kemarin petang Yudhoyono menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Seusai pertemuan yang berlangsung sekitar 25 menit itu, Yudhoyono hanya mengucapkan selamat malam kepada wartawan yang menunggunya dan segera masuk ke mobil.

Sementara Kalla mengatakan, dalam pertemuan itu, dirinya dan Yudhoyono yakin aksi unjuk rasa pada 4 november akan berjalan dengan baik, tanpa dan tidak anarki.

Saat ditanya wartawan apakah dalam pertemuan itu Yudhoyono memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatannya di balik aksi unjuk rasa pada Jumat mendatang, Kalla mengaku tidak percaya Yudhoyono melakukan hal itu.

Selasa kemarin sekitar pukul 21.00, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tiba di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera untuk menemui Presiden PKS Mohamad Sohibil Iman. Hingga pukul 22.40, pertemuan di antara keduanya masih berlangsung.

(INA/EDN/WAD/SAN/NTA/
OSA/APA/DEA/AGE/FRN/HAR)



Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla di beranda belakang Istana Merdeka, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (3/11) menjawab pertanyaan jurnalis tentang sejumlah persoalan bangsa yang berkembang belakangan ini. Pemerintah mempersiapkan masyarakat melaksanakan hak konstiusi menyampaikan pendapat dengan tetap mengikuti peraturan yang berlaku.

KEBEBASAN BERPENDAPAT

Presiden dan Wapres Berkantor seperti Biasa

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tetap akan berkantor seperti biasa sepanjang Jumat (4/11). Masyarakat juga diharapkan beraktivitas secara normal meski hari ini ada unjuk rasa terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama.

"Masyarakat tetap bekerja saja seperti biasa. Yang jelas, saya ada di Jakarta," kata Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/11). Presiden menyampaikan hal itu bersama dengan Wakil Presiden.

Secara khusus, Kalla meminta dunia usaha tetap bekerja seperti biasa agar produktivitas tidak terganggu. Investor tidak perlu khawatir dengan unjuk rasa yang akan digelar hari ini.

Indonesia, kata Kalla, adalah negara demokrasi sehingga unjuk rasa merupakan hal yang wajar sepanjang dilakukan sesuai aturan.

KRL Tetap Beroperasi

HAL 28

an. "Jadi biasa saja. Hampir tidak ada hari tanpa unjuk rasa di depan (Istana Merdeka) itu," katanya.

Terkait unjuk rasa hari ini, Kalla berpesan agar dilakukan secara tertib dan jangan sampai dirusak pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalla juga meminta pengunjuk rasa mewaspadai penyusupan yang bertujuan mengacaukan keadaan.

Menyikapi rencana unjuk rasa tersebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengimbau warganya agar memperbanyak doa dan melakukan istigash di masjid atau pondok pesantren (ponpes) masing-masing setelah shalat Jumat hari ini.

"Sejak malam ini (Kamis

(Bersambung ke hal 15 kol 5-7)

REKAYASA LALU LINTAS DEMONSTRASI 4 NOVEMBER 2016 DI JAKARTA



1 Titik Kepadatan Istana Negara

Pengalihan Arus Lalu Lintas

- Jalan Gajah Mada-Jalan Juanda-Jalan Pasar Baru-Jalan Gunung Sahari-atau ke Lapangan Banteng-Jalan Pejambon-Jalan Merdeka Timur-Ridwan Rais-Tugu Tani, dan seterusnya.
- Budi Kemuliaan-Jalan Majapahit-Harmoni, dan seterusnya.
- Tugu Tani-Jalan Merdeka Selatan belok ke kiri ke Jalan Thamrin-Jalan Sudirman, dan seterusnya atau Tugu Tani-Ridwan Rais-Jalan Merdeka Timur-Jalan Perwira-Jalan Veteran Raya atau ke Jalan Pasar Baru-Jalan Gunung Sahari, dan seterusnya.

2 Jalan Merdeka Barat dan sekitarnya

Pengalihan Arus Lalu Lintas

- Bundaran HI-Jalan Sutan Syahrir-Jalan Agus Salim dan seterusnya atau Bundaran HI-Jalan Imam Bonjol-Jalan Diponegoro, dan seterusnya.

3 Jalan Sudirman-Thamrin

Pengalihan Arus Lalu Lintas

- Arus dari Kuningan diluruskan ke Slipi, baik arteri maupun jalan tol.
- Arus lalu lintas dari Slipi diluruskan ke Kuningan dan seterusnya, baik arteri maupun jalan tol.

Presiden dan Wapres Berkantor seperti Biasa

(Sambungan dari halaman 1)

malam), sebagian ponpes sudah menyelenggarakan doa bersama. Agar unjuk rasa aman dan damai, warga NU lebih baik berdoa atau melakukan istigash di masjid atau pondok pesantren masing-masing," kata Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini, kemarin.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing isu yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, sikap tenang dan berpikir jernih dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi menjadi wajib dimiliki.

Pengamanan

Sejak Kamis pagi hingga siang hari, empat helikopter militer terbang dengan prajurit berseragam anti teror mulai dari di atas sekitar Kompleks Istana, Masjid Istiqlal, Monumen Nasional di Jakarta Pusat hingga ke Jakarta Selatan.

Menteri Koordinator Kematriman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, helikopter militer tersebut sedang melakukan latihan biasa yang menjadi prosedur standar operasi TNI.

Sementara itu, kemarin sore, sebagian pengunjung rasa mulai

terlihat di Masjid Istiqlal. Hari ini, dari Masjid Istiqlal, pengunjung rasa akan berjalan menuju depan Istana Merdeka.

Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya Inspektur Jenderal M Iriawan mengatakan, untuk mengamankan unjuk rasa tersebut, antara lain dikerahkan sekitar 500 anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dinamakan Pasukan Asmaul Husna karena mereka memiliki kemampuan yang baik tentang agama dan sekitar 300 anggota polisi wanita yang menggunakan hijab.

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab mengatakan, tujuan utama unjuk rasa itu adalah menuntut pembuktian Presiden Joko Widodo yang tak akan mengintervensi kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki. "Kami berkomitmen aksi berlangsung tenang dan damai," katanya.

Dimintai keterangan

Kemarin, Rizieq dimintai keterangan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait kasus Basuki. Rizieq, yang didampingi belasan petinggi FPI, dimintai keterangan mulai dari pukul 13.00 hingga pukul 20.30.

Ketika tiba di gedung Bareskrim, Rizieq disambut Direktur

Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Agus Andrianto.

Seusai memberikan keterangan, Rizieq meminta Bareskrim Polri mempercepat pelaksanaan gelar perkara kasus tersebut sehingga segera ada titik terang terkait status Basuki.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto menyatakan, Rizieq dimintai keterangan sebagai pihak pelapor perkara tersebut dan ahli bidang agama.

Basuki, kata Ari Dono, akan dipanggil ke Bareskrim pada Senin pekan depan. Sebelumnya, Basuki juga telah memberikan keterangan kepada penyidik Bareskrim pada Senin (24/10). Dalam kasus ini, Polri telah memeriksa 22 saksi dan ahli.

Ari Dono menegaskan, Polri tidak terpengaruh dengan kondisi apa pun dalam mengusut kasus ini. "Kami tidak ada kaitannya dengan desakan. Proses penegakan hukum tetap berjalan. Kami tidak akan terpengaruh dengan kondisi apa pun," katanya.

(TIM KOMPAS)



Lihat Video Terkait
"Rizieq Diperiksa Sebagai Saksi Ahli"
di kompasprint.com/vod/rizieqdiperiksa



Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian (kanan) didampingi Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin menyampaikan keterangan pers terkait kasus perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama di Ruang Rupatama, Markas Besar Polri, Jakarta (16/11).

Hormati Proses Hukum

Pencalonan Basuki di Pilkada DKI Tidak Gugur

JAKARTA, KOMPAS — Pencalonan Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tak gugur dan tak dibatalkan meski yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama. Basuki tetap dapat mengikuti semua tahapan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pencalonan Basuki sebagai gubernur baru gugur jika ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membuktikan ia melakukan tindak pidana dengan ancaman minimal 5 tahun penjara.

Aktor Politik

HAL 2

bes Polri, Jakarta, mengumumkan Basuki sebagai tersangka kasus penistaan agama.

Penetapan Basuki sebagai tersangka ini berdasarkan alat bukti yang cukup.

SEJUMLAH ATURAN TERKAIT CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR YANG TERSANGKUT KASUS HUKUM

UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 191

- Calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon (paslon) dipidana 24-60 bulan penjara dan denda Rp 25 miliar-Rp 50 miliar.

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat 4

- Partai politik (parpol) atau gabungan parpol yang telah mendaftarkan bakal paslon tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 88 A

- Paslon dikenai sanksi talan sebagai peserta pemilu jika terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana minimal 5 tahun yang mempunyai kekuatan tetap sebelum hari penghitungan suara.

UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 163 Ayat 6-8

- Jika cagub dan/atau cawagub terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, maka paslon yang bersangkutan tidak dapat menarik dukungannya.
- Jika cagub dan/atau cawagub terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, maka paslon yang bersangkutan tidak dapat menarik dukungannya.
- Jika cagub dan/atau cawagub terpilih ditetapkan menjadi terpidana, maka paslon yang bersangkutan tidak dapat menarik dukungannya.

Hormati Proses Hukum

(Sambungan dari halaman 1)

yang akan dimulai pekan depan, Basuki dicegah bepergian ke luar negeri. Namun, menurut Ari Dono, penyidik kasus ini tidak akan mengganggu kegiatan Basuki di Pilkada 2017.

Diapresiasi

Secara terpisah dalam pernyataan bersama yang kemarin dibacakan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, sedikitnya 22 perwakilan ormas dan lembaga Islam mengapresiasi putusan langkah Polri dalam kasus Basuki. Apresiasi juga diberikan kepada Presiden Joko Widodo karena tidak mengintervensi kasus tersebut. Selanjutnya, mereka akan mengawal jalannya proses hukum terhadap Basuki.

Dengan penetapan status tersangka kepada Basuki, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin yang hadir di acara itu mengimbau umat Islam agar tidak melakukan aksi-aksi lanjutan, termasuk dengan adanya rencana Aksi Bela Islam, 25 November. Umat diharapkan sabar menanti proses hukum.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap semua elemen bangsa tidak terpecah karena kasus ini.

Sementara itu, Basuki menyatakan menerima penetapan dirinya sebagai tersangka. Basuki dan pasangannya, Djarot Saiful Hidayat, juga menyampaikan terima kasih kepada ulama, tokoh masyarakat, dan warga yang turut mewujudkan Jakarta yang damai. Keduanya menyerahkan penanganan kasus ke kepolisian dan tim kuasa hukumnya.

Koordinator tim hukum Basuki, Sirra Prayuna, menyatakan, timnya tidak mengajukan praperadilan terkait penetapan Basuki sebagai tersangka. Praperadilan dinilai hanya akan menguras energi dan waktu yang sebenarnya bisa dipakai untuk berinteraksi dengan warga DKI.

Tak berpengaruh

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, pencalonan Basuki sebagai gubernur baru gugur jika pengadilan menjatuhkan vonis pidana kepadanya dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih. "Meski vonisnya di bawah 5 tahun, tetapi kalau tindak pidananya diancam hukuman 5 tahun penjara atau lebih, calon tetap akan digugurkan," kata Sumarno.

Jika vonis jatuh sebelum hari pemungutan suara, parpol pengusung masih mungkin mengajukan calon pengganti. Calon pengganti diajukan paling lambat 30 hari sebelum hari-H pemungutan suara. Ini berarti paling lambat 15 Januari 2017 karena pemungutan suara Pilkada 2017 dilakukan 15 Februari.

"Jika calon gubernur terpilih dan status hukumnya berubah menjadi terpidana, otomatis dia akan diberhentikan. Lalu, wakil gubernur terpilih akan naik menjadi gubernur," kata Sumarno.

Meski ditetapkan sebagai tersangka, Basuki juga tak boleh mundur sebagai calon gubernur karena saat ini dia sudah resmi ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Pasangan calon yang mundur setelah penetapan akan dikenai sanksi pidana kurungan 24-60 bulan dan denda Rp 25 miliar-Rp 50 miliar. Besar sanksi yang sama juga dikenakan terhadap pimpinan parpol atau gabungan parpol yang menarik pasangan calonnya setelah pasangan calon itu ditetapkan. Ketentuan ini ada di Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Di pilkada DKI kali ini, pasangan Basuki-Djarot diusung oleh PDI-P, Partai Golkar, Nasdem, dan Partai Hanura.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, partainya tetap berkomitmen terhadap pasangan Basuki-Djarot. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto juga menegaskan, partainya tetap mendukung pe-

nuh Basuki-Djarot.

Anggota Dewan Pengarah Tim Pemenangan Basuki-Djarot, Faykhun Andriadi dari Partai Golkar mengatakan, tim pemenangan beserta pasangan calon akan fokus melakukan sosialisasi dan membina komunikasi dengan masyarakat.

Calon gubernur DKI nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan, tak ada keuntungan ataupun kerugian bagi dirinya sejak Basuki ditetapkan sebagai tersangka. Saat ditemui ketika berkampanye di Kelurahan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur, Agus juga menuturkan, sebaiknya masyarakat Jakarta menyerahkan kasus Basuki ke proses hukum.

Sementara itu, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan, menyatakan, penetapan Basuki sebagai tersangka merupakan persoalan hukum. "Proses hukum ini biarkan tetap jalan. Kami tetap konsentrasi pada pilkada, tidak ada kaitannya," katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani tidak menampilkan, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung partainya diuntungkan secara tidak langsung dengan penetapan Basuki sebagai tersangka.

(DEA/IRE/MDN/MKN/
GRE/MAM/BKY/ENG/HRS/
SAN/ONG/NA/AGE/
IAN/REK/NTA/NDY)

Lihat Video Terkait
"Ahok Minta Pendukungnya Hormati Proses Hukum"
di kompasprint.com/vod/reaksi Ahoktsk



Lihat Video Terkait
"Polisi Tetapkan Ahok Tersangka Dugaan Penistaan Agama"
di kompasprint.com/vod/ahoktersangka



Suarakan komentar Anda mengenai artikel ini dan baca di kompasprint.com

SERTIFIKAT

PRAKTIKUM MEDIA

Direktur Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IDA FADILAH
Tempat/ Tanggal Lahir : JAKARTA, 15 JULI 1995
Nomor Induk Mahasiswa : 13210101
Universitas : UIN SUNAN KALIJAGA
Jurusan / Program Studi : KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM
Konsentrasi : JURNALISTIK

Telah melaksanakan Praktikum Media (Magang Profesi) di SIGAB
dari tanggal 26 September 2016 s/d 21 Oktober 2016
Bidang Pekerjaan Kontributor portal informasi difabel solider.or.id dengan predikat
"A" (Sangat Memuaskan)

Yogyakarta, 23 Desember 2016

Wakil Direktur SIGAB


SIGAB

HARIS MUNANDAR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

79

Nomor: UIN.02/L.3/PM.03.1/P3.517/2016

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada :

Nama : Ida Fadilah
Tempat, dan Tanggal Lahir : Jakarta, 15 Juli 1995
Nomor Induk Mahasiswa : 13210101
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek, Tahun Akademik 2015/2016 (Angkatan ke-89), di :

Lokasi : Banaran
Kecamatan : Galur
Kabupaten/Kota : Kab. Kulonprogo
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 20 Juni s.d. 31 Juli 2016 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 96,75 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 15 September 2016

Ketua,



Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

NIP. 19720912 200112 1 002

UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Ida Fadilah
NIM : 13210101
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan/Prodi : Komunikasi Dan Penyiaran Islam
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	80	B
2.	Microsoft Excel	75	B
3.	Microsoft Power Point	90	A
4.	Internet	50	D
5.	Total Nilai	73.75	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 24 Mei 2017

Rika Kepala PTIPD



Hendra Hidayat, S.Kom
NIP. 19790506 200604 1 003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.21.3.73/2017

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Ida Fadilah**
Date of Birth : **July 15, 1995**
Sex : **Female**

took Test of English Competence (TOEC) held on **May 26, 2017** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	37
Structure & Written Expression	40
Reading Comprehension	39
Total Score	387

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, May 26, 2017
Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.21.9.10/2016

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Ida Fadilah :

تاريخ الميلاد : ١٥ يوليو ١٩٩٥

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٧ نوفمبر ٢٠١٦, وحصلت
على درجة :

٤٩	فهم المسموع
٤٧	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٣٠	فهم المقروء
٤٢٠	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا, ١٧ نوفمبر ٢٠١٦

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥





Nomor: UIN.02/R.1/PP.00.9/2752.a/2013

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : IDA FADILAH
NIM : 13210101
Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2013/2014

Tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2013 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 2 September 2013

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag.
NIP. 19591218 197803 2 001

SERTIFIKAT

No : /PAN.OPAK-UIN-SUKA/VIII/13

diberikan kepada :

IDA FADILLAH

sebagai :

PESERTA

dalam kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kampus (OPAK)
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta
2013

dengan tema :

“Menciptakan Gerakan Mahasiswa yang Berasaskan Ahl As-Sunnah wa Al-Jama'ah
Untuk Mengawal Ke-Indonesiaan”

Mengetahui,
Wakil Rektor I

Bid. Akademik dan Kemahasiswaan

Mengetahui,
Presiden

DEMAM UIN Sunan Kalijaga

Dr. Sekar Ayu Aryani, M. Ag.
NIP. 19591218 198703 2 001

Syaefudin Ahrom Al-Ayubbi
NIM. 09470163

Dawamun Ni'am A
Ketua

Saifudin Anwar
Sekretaris

Kampus UIN Sunan Kalijaga

21-23 Agustus 2013

Panitia OPAK

UIN Sunan Kalijaga 2013

OPAK
VIII
2013



LABORATORIUM AGAMA

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT

Pengelola Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

IDA FADILAH

13210101

LULUS

Ujian sertifikasi Baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Laboratorium Agama
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 31 Oktober 2014
Ketua



Dr. H. Waryono, M.Ag.

NIP. 19701010 199903 1 002

Dr. Sriharini, M.Si

NIP. 19710526 199703 2 001



INTEGRATIF-INTERKONEKTIF



DEDIKATIF-INOVATIF



INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

MADRASAH ALIYAH
PROGRAM : ILMU PENGETAHUAN ALAM

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Nomor: MA.01/II.28/ PP. 01.1/ 068/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah Negeri
Babakan Lebaksiu Tegal menerangkan bahwa:

nama : IDA FADILAH
tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15 Juli 1995
nama orang tua : Muhamad Yunus
nomor induk : 13935
nomor peserta : 3-13-03-35-500-068-5

LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Madrasah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tegal, 24 Mei 2013

Kepala Madrasah,



Drs. H. Kamaluddin, MM
NIP. 196012021985031003

MA 110009518



DAFTAR NILAI UJIAN MADRASAH ALIYAH

Program : Ilmu Pengetahuan Alam
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Kurikulum : Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
 Nama : IDA FADILAH
 Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 15 Juli 1995
 Nomor Induk : 13935
 Nomor Peserta : 3-13-03-35-500-068-5

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-Rata Rapor	Nilai Ujian Madrasah	Nilai Madrasah*)
I	UJIAN MADRASAH			
1.	Pendidikan Agama Islam			
a.	Al-Qur'an-Hadis	8,35	9,70	9,16
b.	Akidah-Akhlak	8,03	9,60	8,97
c.	Fikih	8,42	9,20	8,89
d.	Sejarah Kebudayaan Islam	8,57	8,50	8,53
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	8,50	8,20	8,32
3.	Bahasa Indonesia	8,17	8,90	8,61
4.	Bahasa Arab	7,78	9,10	8,57
5.	Bahasa Inggris	7,58	8,70	8,25
6.	Matematika	7,97	8,60	8,35
7.	Fisika	7,48	8,80	8,27
8.	Kimia	7,92	8,80	8,45
9.	Biologi	7,85	9,10	8,60
10.	Sejarah	8,03	8,20	8,13
11.	Seni Budaya	8,35	8,80	8,62
12.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	7,67	7,50	7,57
13.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	7,63	8,80	8,33
14.	Keterampilan/Bahasa Asing	8,00	8,60	8,36
Rata-Rata				8,47

*) Nilai Madrasah = 40% Nilai Rata-Rata Rapor + 60% Nilai Ujian Madrasah

No.	Mata Pelajaran	Nilai Madrasah	Nilai Ujian Nasional	Nilai Akhir *)
II	UJIAN NASIONAL			
1.	Bahasa Indonesia	8,61	8,00	8,2
2.	Bahasa Inggris	8,25	8,00	8,1
3.	Matematika	8,35	7,50	7,8
4.	Fisika	8,27	5,25	6,5
5.	Kimia	8,45	7,75	8,0
6.	Biologi	8,60	7,75	8,1
Rata-Rata				7,8

*) Nilai Akhir = 40% Nilai Madrasah + 60% Nilai Ujian Nasional

Tegal, 24 Mei 2013
Kepala Madrasah,

KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH
NEGERI
BABAKAN
Drs. H. Karzaluddin, MM
NIP. 19601202 1985 03 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ida Fadilah
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 15 Juli 1995
Alamat : JL. Panda VIII/C-9/46 Cikarang Baru RT/RW
001/007, Desa Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat,
Kab. Bekasi.
Nama Ayah : Muhamad Yunus
Nama Ibu : Taslimah
No. HP : 0857 2922 8830
Email : idadadillah112@yahoo.co.id

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN Mekar Mukti 06, tahun lulus 2007
 - b. Mts. N Model Babakan, tahun lulus 2010
 - c. MAN Babakan Lebaksiu Tegal, tahun lulus 2013.
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Madrasah Diniyah Ma'hadut Tholabah tahun 2007-2011.

C. Prestasi/Penghargaan

1. Lomba Festival Paduan Suara tingkat Nasional SDGNCF Semarang tahun 2015.
2. Nominasi 30 besar bersama tim film "Pit" dalam perlombaan Police Movie Festival 2017

D. Pengalaman Organisasi

1. UKM LPM Arena tahun 2014-2016
2. UKM Paduan Suara Gita Savana 2014-2017

Yogyakarta, 17 Agustus 2017

Ida Fadilah